

**KERJA SAMA *STAKEHOLDER* DESA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERBASIS
PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR**
(Studi Pada Desa Kedawung Kecamatan Nlegok Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RISKA ANDISTYANI
NIM. 145030100111031



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

MOTTO

Jika Allah Bersamamu, Lantas Apa yang Buatmu Takut

-Binariyanto Aji-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Mempersembahkan Karya ini

Kepada Orang-Orang Tercinta

Ibu Fitriani Bapak Slamet Bapak Santoso Nenek Boinem

Bulik Sulikah Paklik Mahmudi dan Pakdhe

Atas Segala Perjuangan, Tetesan Keringat serta Doa

Dalam Setiap Mendidikku,

Kepada Ketiga Adik Saya Tercinta Zidane, Aditya, dan Salwa

Yang Selalu mendukung Disetiap Proses Saya Hingga Saat ini.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kerja Sama *Stakeholder* Desa dalam Pengembangan Potensi
Lokal Berbasis Peternakan Ayam Ras Petelur (Studi pada Desa
Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

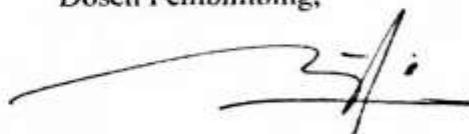
Disusun Oleh : Riska Andistyani

NIM : 145030100111031

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 29 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018
Waktu : 08.00-09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Riska Andistyani
Judul : Kerja Sama *Stakeholder* Desa dalam Pengembangan Potensi Lokal Berbasis Peternakan Ayam Ras Petelur (Studi Pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Dr. Imam Henafi, M.Si., MS
NIP. 19691002 199802 1 001



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Kerja Sama *Stakeholder* Desa dalam Pengembangan Potensi Lokal Berbasis Peternakan Ras Petelur (Studi Pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan sumber pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 Juni 2018

METERAI
TEMPEK

01489AFF1228473

6000
ENAM RIBURUPIAH


Riska Andistyani

NIM. 145030100111031

RINGKASAN

Andistyani Riska, 2018, **Kerja Sama *Stakeholder* Desa dalam Pengembangan Potensi Lokal Berbasis Peternakan Ayam Ras Petelur (Studi pada Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing : Dr. Mochamad Rozikin, M.AP. 138 hal + xiii.

Kerja sama yang terjalin antara *stakeholder* dalam pengembangan potensi lokal sangatlah penting. Hal tersebut akan mendorong terjalannya keterkaitan ekonomi dalam rangka meningkatkan dan memperlancar proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran produk untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama yang terjalin antar *stakeholder* dan berbagai kendala yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Creswell (2012) yaitu mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan men-*coding* data, menetapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis, yang menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif, dan terakhir menginterpretasi atau memaknai data.

Berdasarkan hasil analisis dari dua rumusan masalah yang ditetapkan, hasil yang didapat, antara lain: kerja sama yang dilakukan antara pemerintah desa dan peternak ayam adalah model kerja sama semu; kerja sama yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak UD. Gemilang adalah kerja sama semi produktif; kerja sama yang dilakukan antara peternak ayam dan UD. Gemilang adalah kerja sama subkontrak dan juga hubungan kerja sama mutualistik. Berbagai kendala yang dialami dalam pengembangan peternakan antara lain modal, lahan, sumber daya manusia, dan perencanaan.

Saran dari peneliti yaitu kerja sama harus dilakukan antar *stakeholder*, sehingga pengembangan potensi lokal dapat berjalan dengan baik. Juga, perlunya untuk melakukan kerja sama secara transparan seharusnya ditandai dengan ada surat perjanjian kerja sama untuk memperjelas hak dan kewajiban setiap *stakeholder*.

Kata Kunci: Kerja Sama, *Stakeholder*, Pengembangan Potensi Lokal

SUMMARY

Andistyani Riska, 2018, **Kerja Sama Stakeholder Desa dalam Pengembangan Potensi Lokal Berbasis Peternakan Ayam Ras Petelur (Studi pada Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)**. Undergraduate Thesis, Public Administration Department, Faculty of Administration, Universitas Brawijaya. Supervisor : Dr. Mochamad Rozikin, M.AP 135 Hal + xi.

Cooperation between stakeholders in developing local potential is very important. This will encourage economic interrelation in order to improve and accelerate production process, management, and product marketing to develop local economy through local potential development. This study aims to analyze the cooperation between stakeholders and the problems that are experienced.

This study used descriptive study by using qualitative approach. The data source used are primary and secondary data. The data collection technique used are interview, observation, and documentation. The data analysis used Creswell (2012) which are data management and preparation to be analyzed, reading the whole data, analyzing deeper by coding the data, deciding the coding process to describe analyzed settings, interviewees, categories, and themes, which shows how this description and themes are re-displayed in form of narration or qualitative report, and interpreting the data as the final step.

Based on the result of the analysis on two decided research problems, the obtained data are: cooperation done between village government and chicken farmer is apparent cooperation; cooperation done between village government and UD. Gemilang is semi-productive cooperation; cooperation done by chicken farmer and UD. Gemilang is sub-contract and mutualistic cooperation. Problems experienced in developing farms are stock, field, human resource, and plannings.

Suggestion form the researcher is cooperation should be done between stakeholders, so that the development of local potential goes well. Also, the need of transparent cooperation should be marked by the agreement letters to clear up liberties and responsibilities.

Keyword : Cooperation, Stakeholder, Local Potential Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmad-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KERJA SAMA *STAKEHOLDER* DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERBASIS PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR (Studi pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”**. Skripsi ini merupakan salah syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Dr. Mochammad Rozikin, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu tersayang yang telah mengiringi dan mendukung setiap langkah peneliti dengan doa, kasih sayang, dan dukungan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Kerto Kingdom Retrinia Nur Alim, Wahyu Sugiarti, Wahidiyah Putri, Meitasari, Fitri Widowati yang selalu setia menemani langkah peneliti, membantu baik doa dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku kuliah Devira Tiafani Abadi, Yualita Windi Lestari, Shafira Firdayanti, Dewi Baiturrohmah, yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.
10. Dewan Racana Brawijaya 2017 Binariyanto Aji, Novela Dwi Putri, Andhika Widyadwatmaja, Sekarsih Saptanti, Pabela Purwa Wiyoga, Eka Aprilia Arista Sari, Nada Itorul Umam, yang telah menjadi partner kerja terbaik selama satu tahun kepengurusan dan telah memberikan baik doa maupun semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga KWURT M. Lukman Rohmani, Kurnilia Dewi Astuti, Dewi Rahmawati, Ventisia Tri Arima, Grenandio Harsa Gutama, yang telah menjadi partner kerja dan teman chils terbaik selama ini.

12. Sahabatku RINUGANU Nunik Setyowati, Galuh Febriani, Nurul Aminah, yang telah memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar Arssmaga Kota Blitar pada umumnya dan Purna Arssmaga Kota Blitar Rayon Malang pada khususnya yang telah memberikan dukungan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar Racana Brawijaya yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa.
15. Bapak Budi Jatmiko, Bapak Subandi, dan seluruh pegawai di Kantor Desa Kedawung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dari mulai penelitian berlangsung sampai selesai.
16. Bapak Imam Mahfud dan seluruh pegawai UD. Gemilang yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi dari mulai awal penelitian sampai selesai.
17. Seluruh masyarakat Desa Kedawung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
18. Seluruh teman-teman FIA angkatan 2014 atas kerja sama dan dukungannya selama ini dalam perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 25 Juni 2018

Riska Andistyani



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	15
1. Definisi Administrasi Publik	15
2. Peran Administrasi Publik	17
B. Administrasi Pembangunan	18
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	18
2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan	20
C. Kerja Sama	21
1. Pengertian dan Arti Penting Kerja Sama	21
2. Langkah-Langkah Kerja Sama	23
3. Model dan Jenis Kerja Sama	24
4. Keberhasilan dalam Kerja Sama	29
D. <i>Stakeholder</i>	31
1. Pengertian <i>Stakeholder</i>	31
2. Peran Masing-Masing <i>Stakeholder</i> dalam Kerja Sama	32
E. Pemerintah Desa	34
1. Pengertian Pemerintah Desa	34
2. Otonomi Desa	36
F. Pengembangan Ekonomi Lokal	37
1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal	37
2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal	40
3. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal (LERD)	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	53
G. Analisis Data	54
H. Keabsahan Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Keadaan Geografis Kabupaten Blitar	58
2. Iklim dan Topografi Kabupaten Blitar	61
3. Visi dan Misi Kabupaten Blitar	62
4. Makna Lambang Kabupaten Blitar	65
B. Profil Desa Kedawung	66
1. Sejarah Desa Kedawung	66
2. Karakteristik Wilayah	67
3. Visi dan Misi Desa Kedawung	68
4. Kondisi Sosial	71
5. Keadaan Ekonomi	74
6. Kondisi Sarana dan Prasarana	74
7. Kondisi Pemerintahan Desa	76
C. Profil UD. Gemilang	77
1. Sejarah Singkat UD. Gemilang Blitar	77
2. Lokasi	78
3. Visi dan Misi	79
4. Tujuan Pendirian Perusahaan	79
5. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan	80
D. Penyajian Data Fokus Penelitian	82
1. Kerja sama <i>stakeholder</i> desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	82
a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan peternak ayam	83
b. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak swasta	88
c. Kerja sama antara peternak ayam dengan pihak swasta	89
2. Kendala yang dihadapi dan cara menghadapi kendala dalam proses kerja sama <i>stakeholder</i> desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	99
a. Modal	99
b. Sumber Daya Manusia	101
c. Lahan	104
d. Perencanaan Usaha	107
e. Tidak Stabilitasnya Harga Telur	111

E. Analisis dan Pembahasan	113
1. Kerja sama <i>stakeholder</i> desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	113
a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan peternak ayam	113
b. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak swasta	116
c. Kerja sama antara peternak ayam dengan pihak swasta	117
2. Kendala yang dihadapi dan cara menghadapi kendala dalam proses kerja sama <i>stakeholder</i> desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	124
a. Modal	124
b. Sumber Daya Manusia	127
c. Lahan	129
d. Perencanaan Usaha	130
e. Tidak Stabilitasnya Harga Telur	132
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
 DAFTAR PUSTAKA	138
 LAMPIRAN	

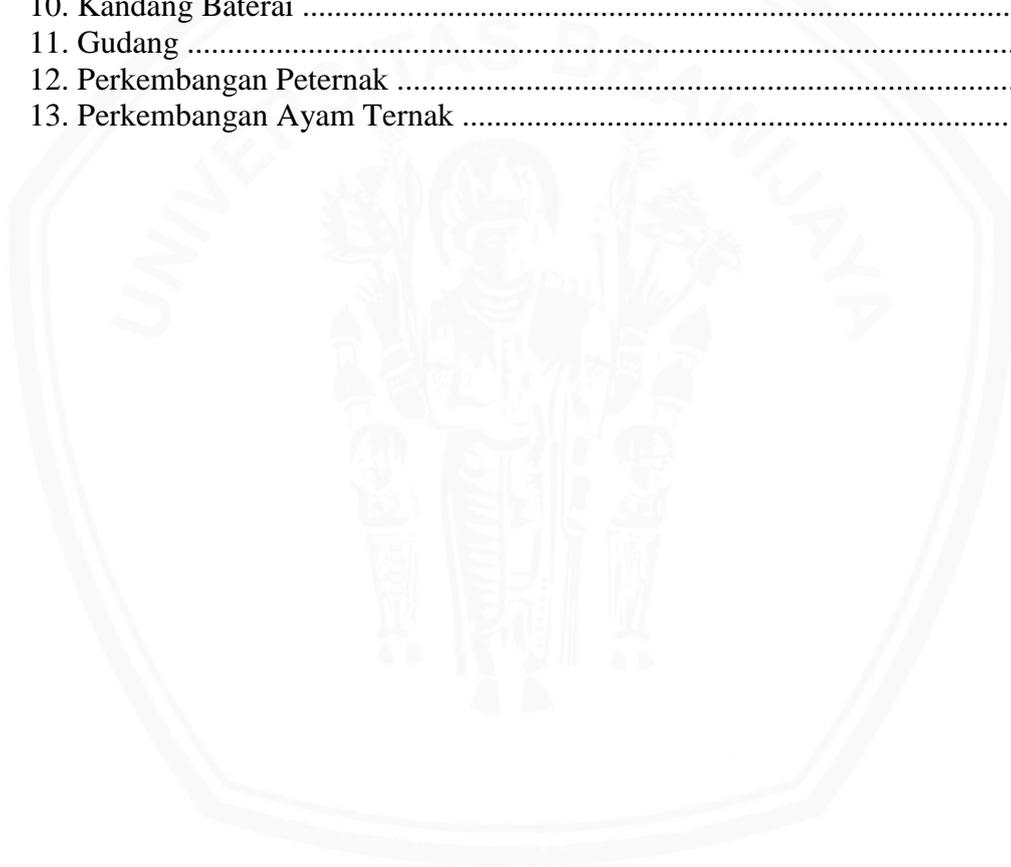
DAFTAR TABEL

1. Hasil Produksi Telur Ayam Ras Petelur	7
2. Perbandingan Produksi Telur Kabupaten Blitar dengan Kota/Kabupaten lain di Jawa Timur	8
3. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah	38
4. Mata Pencahian dan Jumlahnya	74



DAFTAR GAMBAR

1. Analisis Data Model Creswell	55
2. Peta Kabupaten Blitar	61
3. Lambang Kabupaten Blitar	65
4. Kantor Desa Kedawung	66
5. Balai Kantor Desa Kedawung	68
6. Struktur Organisasi Desa Kedawung	77
7. Kantor UD. Gemilang	79
8. Proses Pendistribusian Pakan Ayam	93
9. Proses Pengambilan Telur dari Peternak	93
10. Kandang Baterai	105
11. Gudang	106
12. Perkembangan Peternak	120
13. Perkembangan Ayam Ternak	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dari dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokratis, penegakan keadilan dan pemerataan pembangunan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka NKRI. Selanjutnya di dalam daerah kota/kabupaten terdapat pemerintahan terendah disebut desa. Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang gerak khusus bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan prakarsa

sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 secara tegas mengatakan bahwa:

“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menyimpulkan isi maksud dari pasal diatas, dijelaskan bahwa segala bentuk pengelolaan sumber daya serta kekayaan yang dimiliki oleh desa, kini diselenggarakan oleh desa sendiri dengan kebijakan dan kreativitas dari pemerintah desa setempat.

Otonomi desa diharapkan dapat mengembangkan perekonomian di pedesaan dengan karakteristik sumber daya yang ada seperti yang diungkapkan oleh Heruman (1997) dalam Retnowati (2017:4) pembangunan pedesaan dapat dipandang dari dua sisi yaitu:

“Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.”

Menurut Supriatna (2000:64) pembangunan ekonomi pedesaan yaitu suatu proses, dimana suatu negara dapat menggunakan sumber daya produksi sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pengembangan desa

swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia.

Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia melalui pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang pendekatannya berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis sumber daya lokal diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Kurniawan (2010:20) mengatakan bahwa masyarakat menentukan apa dan bagaimana masa depan mereka sendiri, mengidentifikasi potensi (sumber daya) lokal dan memikirkan aktivitas ekonomi seperti apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.

Berkembangnya konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menjadi konsep *Local Economic Resources Development* (LERD) lebih berorientasi pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia di suatu wilayah dengan mengedepankan kerja sama antar *stakeholder*. Menurut Said dalam Ariyani (2015:41), perkembangan teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) / *Local*

Economic Development (LED) menjadi teori *Local Economic Resources Development* (LERD), dikarenakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal (LERD) secara nasional merupakan urgensi/kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh daerah maju maupun relatif tertinggal
2. Sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan otonomi daerah sehingga tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan ekonomi setiap daerah secara terpusat.

Dimana konsep LERD menurut Said dalam Ariyani (2015:9) adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Unsur yang harus ditonjolkan adalah unsur lokal yang merupakan karakteristik masing-masing wilayah. Pola koordinasi dari LERD ini melibatkan *stakeholder* yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi daerah.

Stakeholder tersebut tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan pengembangan potensi lokal. Kerja sama yang strategis antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lain sangat diperlukan dalam pelaksanaannya sehingga pengembangan potensi lokal dapat berjalan searah dengan tujuan bersama. Notoatmodjo (2003:27) menyebutkan kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu unsur dua pihak

atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Di sisi lain, kerja sama diartikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang timbul apabila sekelompok orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak mungkin dicapai secara sendirian. Kerja sama memberikan peluang kepada pihak yang terlibat untuk dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Adanya kerja sama dalam pengembangan potensi lokal sangat penting karena diantara *stakeholder* akan terjalin keterkaitan ekonomi (*economic linkages*) dalam rangka meningkatkan dan memperlancar proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran produk untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi lokal. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Soemarno (2004:389), bahwa upaya untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi dapat diwujudkan melalui pembentukan jaringan kerja sama diantara aktor-aktor terkait, yaitu masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta pihak swasta, baik dari kalangan pengusaha besar, menengah, maupun pengusaha kecil. Tanpa adanya kerja sama pemerintah tidak dapat melakukan semua hal sendiri, karena kemampuan pemerintah itu terbatas.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang industri peternakan. Sektor peternakan mempunyai peran yang strategis dalam penyediaan sumber pangan, energi, dan sumber pendukung lainnya, sehingga mempunyai dampak yang signifikan bagi kemajuan perekonomian daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan bahwa yang dimaksud dengan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengelolaan, pemasaran perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya peternakan adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.

Di Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen pertahun dari tahun 2000-2010 (Badan Pusat Statistik, 2010) adalah sasaran pasar potensial bagi banyak negara produsen pangan dari hasil peternakan, akan tetapi Indonesia tidak sepenuhnya import ada beberapa komoditas hasil ternak yang telah berswasembada dan ada juga yang masih bergantung ketersediaannya dari import. Selayaknya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dan berpotensi untuk menjadi negara pengekspor produk peternakan. Hal itu sangat mungkin diwujudkan karena ketersediaan sumber daya manusia yang cukup mendukung. Akan tetapi pembangunan peternakan masih kurang, karena ada beberapa komoditi yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut disebabkan karena berbagai kelemahan struktural dalam sistem pengembangan peternakan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mencari model pengembangan dan kelembagaan yang tepat dan secara ekonomis menguntungkan dalam penerapannya. Terlepas dari itu, Indonesia sendiri mempunyai komoditas peternakan unggul yang sudah

memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan sampai ekspor salah satunya yaitu telur. Pernyataan ini didukung oleh harian Antara News (2015) yang menyatakan bahwa;

“Indonesia siap mengekspor 100.000 butir Hatching Eggs (HE) Parent Stock atau telur induk ayam senilai Rp. 2,72 miliar ke Myanmar. Dirjen Peternakan dan kesehatan hewan Kementerian Muladno Bashar di Jakarta, Jum’at menyatakan, ekspor telur tetas tersebut dilakukan perusahaan unggas Japfa Comfeed dilakukan dalam tiga tahap hingga akhir tahun dengan pengapalan pada 8 September 2015”

Produksi telur ayam ras petelur dalam negeri mempunyai produksi sebesar 1.224.399,58 ribu ton pada tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat di angka 1.244.311,65 ribu ton. Meningkat lagi pada tahun 2015 pada angka 1.372.829 ribu ton dengan peningkatan tersebut maka Indonesia bisa memenuhi kebutuhan telur dalam negeri. Berikut tabel yang menunjukkan hasil produksi telur nasional berdasarkan tahun 2013-2015.

Tabel 1 Hasil Produksi Telur Ayam Ras Petelur

Produksi Telur (1.000 Ton)	2013	2014	2015
Ayam Ras Petelur	1.224.399,58	1.244.311,65	1.372.829

Sumber: pertanian.go.id

Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil komoditas telur terbesar nasional dibanding dengan provinsi lainnya, dengan produksi telur pada tahun 2014 sebesar 291.399 ton. Meningkat pada tahun 2015 sebesar 390.055 ton (peternakan.go.id). Ini membuktikan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan produksi telur terbesar diikuti oleh produsen terbesar kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah yaitu menghasilkan 202.110 ton pada tahun 2015.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Profil Kabupaten Blitar (2014:12) mengatakan bahwa Kabupaten Blitar merupakan produsen telur di Jawa Timur yang paling tinggi diantara Kota/Kabupaten di Jawa Timur lainnya, maka dari itu Kabupaten Blitar disebut sebagai sentra produksi telur yang mencukupi 70% kebutuhan telur di Jawa Timur dan 30% Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah yang menunjukkan perbandingan produksi telur Kabupaten Blitar dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

Tabel 2 Perbandingan Produksi Telur Kabupaten Blitar dengan Kota/Kabupaten lain di Jawa Timur

Kota/Kabupaten	Tahun		
	2013	2014	2015
Blitar	110.069.589	105.665.977	151.826.220
Kediri	56.409.017	51.250.009	50.930.887
Tulungagung	25.181.807	26.237.806	40.674.318
Malang	21.014.544	23.602.979	24.285.555
Magetan	16.713.874	15.024.015	28.437.873

Sumber: Disnak Provinsi Jawa Timur

Tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar menempati urutan pertama sebagai produsen telur Jawa Timur, disusul dengan Kabupaten Kediri yang produksi rata-rata pertahun sebesar 52.374.267 ton atau setengah dari produksi telur Kabupaten Blitar yang rata-rata produksinya mencapai 105.264.475 ton pertahun. Setelah itu ada Tulungagung dengan rata-rata produksi 25.251.685 ton pertahun, Malang dengan produksi 22.013.028 ton pertahun dan Magetan dengan produksi 15.267.567 ton pertahun. Beradanya Kabupaten Blitar pada urutan pertama untuk produsen telur, maka daerah ini menjadikan sentra pada komoditas telur. Produsen telur di Kabupaten Blitar paling banyak berada di lima kecamatan yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wonodadi. Lima kecamatan

tersebut terdapat banyak peternak ayam petelur kecil maupun besar, dimana Kecamatan Nglegok merupakan termasuk lima besar penghasil telur di Kabupaten Blitar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar).

Kecamatan Nglegok berada di bagian utara Kabupaten Blitar dengan memiliki 92,56 Km² dan terbagi menjadi 10 desa dan 1 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Nglegok sampai akhir tahun 2013 berjumlah 71.958 jiwa. Kecamatan Nglegok pada tahun 2014 mempunyai jumlah total ayam petelur sebanyak 1.001.955 ekor (<https://blitarkab.bps.go.id>). Dilihat dari fakta tersebut Kecamatan Nglegok mempunyai potensi peternakan yang besar. Akan tetapi pada tahun 2017 peternak di Kabupaten Blitar mengalami kerugian karena disparsu harga, seperti yang diungkapkan oleh Surahman Suwandi selaku Direktur Perbibitan dan produksi Ternak Kementerian Pertanian menyatakan rasa keprihatinannya, pasalnya para peternak mengalami kerugian karena disparsu harga dan mayoritas terlilit hutang dengan bank. Harga telur dari peternak sekitar Rp. 12.000 – Rp. 13.000 per kilogramnya, sedangkan dipasaran harga telur Rp. 18.000 per kilogram, dan harga di Jakarta mencapai Rp. 21.000 per kilogram. Ada indikasi permainan harga dipasar. Namun hal ini akan terus diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUDD) (blitarkab.go.id).

Masyarakat mengeluhkan buruknya harga telur tersebut dibarengi dengan terus melonjaknya harga pakan sehingga biaya produksi dengan hasil produksi yang dihasilkan tidak seimbang. Peternak juga menduga bahwa ada perusahaan besar memelihara ayam ras petelur sehingga mengancam peternak rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Suparman selaku koordinator peternak ayam petelur Blitar

bahwa para peternak berharap, bukan saja Pemerintah Kabupaten Blitar namun juga Pemerintah Pusat bisa memberikan solusi bagi mereka. Para peternak mensinyalir ada perusahaan besar yang ikut memelihara ayam petelur dengan jumlah jutaan ekor. Kondisi ini menurut mereka mengancam bahkan merugikan peternak rakyat.

Tidak adanya sikap preventif dari pemerintah untuk mencegah dan melindungi peternak juga menjadi alasan mengapa terjadinya permasalahan ini. Beberapa peternak kecil yang paling merasakan imbas dari permasalahan ini sehingga sebagian peternak di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok sampai menjual ternak ayamnya yang masih produktif untuk memenuhi kebutuhan pakan dan membayar hutang kepada pihak Unit Dagang (UD). Meruginya peternak ayam ras petelur ini berakibat pada menurunnya produksi telur. Menurunnya produksi telur tersebut pasti akan mempengaruhi kebutuhan telur di tingkat nasional karena Kabupaten Blitar merupakan salah satu penyokong telur terbesar di tingkat nasional. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Blitar Marhaenis yaitu Kabupaten Blitar merupakan satu diantara daerah penyokong telur terbesar tingkat nasional. Ketidakseimbangan antara harga telur dan pakan tentu akan sangat mempengaruhi tingkat produksi dan pastinya akan berpengaruh terhadap kebutuhan telur di tingkat nasional (blitarkab.go.id).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa proses kerja sama oleh *stakeholder* dalam pengembangan potensi lokal sangat penting. Hal tersebut mengingat bahwa peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah menjadi industri yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang

berskala rumah tangga dan tentunya juga berpotensi menjadi prosuk unggulan dan dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menyerap tenaga kerja. Selain itu, persoalan-persoalan mengenai harga yang tidak stabil dan menyebabkan peternak rugi itu perlu untuk cepat ditangani. Penyelesaian permasalahan tersebut perlu adanya kerja sama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kerja Sama Stakeholder Desa dalam Pengembangan Potensi Lokal Berbasis Peternakan Ayam Ras Petelur (Studi pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dan bagaimanakah cara untuk mengatasi kendala dalam proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dan cara untuk mengatasi kendala dalam proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan terdapat kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait penelitian ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Manfaat Akademis

Sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai perbandingan dalam mengkaji alternatif pengembangan potensi daerah berbasis peternakan ayam ras petelur.

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gagasan, rekomendasi, dan pertimbangan bagi pemerintah terkait pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana sosialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupunsosial dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan tentang pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur.

E. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini berisi keseluruhan dari karya ilmiah, yang disusun secara garis besar dengan tujuan agar dapat mengetahui isi proposal skripsi tersebut. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab. Pertama, diawali dengan latar belakang tentang kerjasama stakeholder desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nlegok Kabupaten Blitar. Kedua, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diambil. Ketiga, tentang tujuan dari penelitian ini. Keempat, tentang kontribusi penelitian dan yang kelima, mengurai tentang sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang di dalamnya membahas tentang landasan teoritis yang digunakan yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar dan teori yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu : Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan, Kerja Sama, *Stakeholder*, Pemerintah Desa, dan Pengembangan Ekonomi Lokal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam bab ini mencakup materi yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Sumber Data yang berasal dari data primer dan data sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis Data dan Keabsahan Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis, dan dipaparkan dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Menurut Simon dalam Pasolong (2012:32) mendefinisikan Administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Siagian (2004:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Pasolong (2012:51) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Sedangkan definisi publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat. Chadler dan Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk

memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Rosenbloom dalam Pasolong (2012:4) menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan Pasolong (2012:57) mendefinisikan administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Gordon dalam Sjamsuddin (2006:116) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu negara atau daerah, sedangkan motif atau tujuan dari seluruh proses kegiatan dari administrasi publik adalah pemberian layanan (*service*) yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat. Menurut Sjamsuddin (2010:120) sifat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan yang sama terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses kerja sama yang

dilakukan oleh pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap program dan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Peran Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu ruang lingkup negara. Peran yang dilakukan administrasi publik bisa berdampak baik atau buruk bagi suatu negara. Menurut Gray dalam Pasolong (2007:180) menjelaskan peran administrasi publik sebagai berikut:

- a. Administrasi publik telah menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok miskin secara merata dan berkeadilan. Dalam hal ini administrasi publik mencegah kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat.
- b. Administrasi memiliki hak-hak untuk memberikan perlindungan kepada setiap hak-hak masyarakat atas kepemilikan kekayaan menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab atas diri mereka sendiri.
- c. Administrasi publik juga melestarikan serta menjaga nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi, memberikan jaminan dan dukungan sehingga nilai-nilai tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai dan selaras dengan budaya lain yang ada di lingkungannya. Hal ini jelas bahwa administrasi publik mampu memberikan nilai-nilai serta bisa beradaptasi

dimasyarakat sesuai dengan tuntutan zaman sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada.

B. Adminsitration Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut Sigian (2000:4) administrasi pembangunan itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Selanjutnya Siagian (2000:4) menjelaskan bahwa:

“administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).”

Todano dalam Hardjanto (2008:2) mengertikan pembangunan sebagai:

“suatu bentuk multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam tingkat kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan.”

Menurut Tjokroamidjojo dalam Sari (2018:12) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif yang mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui pengarahannya dan alokasi sumber daya untuk pembangunan. Riggs, Fred W dalam Sari (2018:13) mengungkapkan bahwa peristilahan administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai

sasaran. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program.

Selain itu menurut Siagian (2011:5) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Sedangkan sebagai studi interdisipliner, menurut Hardjanto (2008:6) administrasi pembangunan mempunyai dua fokus utama, yaitu:

- a. Pembangunan atau pengembangan administrasi (*the development of administration*), yaitu mengembangkan kapasitas institusi organisasi dan penyempurnaan manajemen dari proses perubahan, dan;
- b. Administrasi pembangunan (*the administration of development*), yaitu peningkatan kemampuan untuk membentuk mengimplementasikan kebijakan atau program pembangunan dalam semua sektor.

Adapun unsur-unsur pembangunan (*development*) menurut Suryono (2010) meliputi:

- a. Perubahan, yaitu perubahan dari suatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- b. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik;
- c. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digantikan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi pembangunan diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu bentuk proses

kegiatan pemerintah yang dilakukan secara sadar untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk membawa masyarakatnya pada kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan tidak lain adalah administrasi negara yang juga lebih ditujukan untuk mendukung proses pembangunan. Dengan demikian ruang lingkup administrasi pembangunan adalah penyempurnaan administrasi bagi penyelenggaraan proses pembangunan. Adapun ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto (2015:52-53) adalah sebagai berikut:

- a. *The administration of development*, yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif;
- b. *The development of administration*, yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara;
- c. Pembangunan partisipasi masyarakat. Anggota masyarakat diajak berpikir dan berkontribusi mulai dari awal pembangunan sampai berhasil diwujudkan tujuan pembangunan. Keterlibatan atau partisipasi warga tidak hanya penting guna mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan saja, melainkan juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap pelaksanaan serta hasil-hasil pembangunan.

Ruang lingkup administrasi pembangunan seperti yang telah dikemukakan diatas mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dari awal perumusan kebijakan-kebijakan dan program-

program hingga terwujudnya kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dibuat. Pada dasarnya apa yang dibangun adalah bersumber dari masyarakat dan hasilnya ditujukan kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat merupakan ruang lingkup yang penting di dalam administrasi pembangunan.

C. Kerja Sama

1. Pengertian dan Arti Penting Kerja Sama

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari segala aktivitas yang berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu kerja sama sangat dibutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana pengertian kerja sama dibawah ini:

- a. Bowo dan Andy (2007:50-51) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerja sama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya (*win-win*).
- b. Moch. Jafar Hafisah (2000) mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan (kerja sama) adalah *win-win solution*. Bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang berkerjasama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga

keuntungan atau kerugian yang diderita kedua belah pihak bersifat proporsional yaitu sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing.

Dari beberapa pengertian kerja sama diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang terkandung di dalam kerja sama. Pertama, dua orang atau lebih artinya kerja sama akan ada apabila minimal dua orang atau pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerja sama ditentukan oleh peran dari kedua orag atau pihak yang bekerjasama tersebut. Kedua, aktivitas menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan energi. Ketiga, tujuan atau target merupakan aspek yang menjadi sasaran dan kerja sama usaha tersebut, biasanya keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. Keempat, jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua belah pihak kapan kerja sama itu berakhir.

Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2003:72) terdapat tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kerja sama oleh masing-masing anggota kerja sama yaitu:

- a. Prinsip kesetaraan (*Equity*)
Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kerjasama harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.
- b. Prinsip keterbukaan
Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kerja sama sampai berakhirnya kegiatan, dengan saling terbuka akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu antar pihak.
- c. Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kerja sama memperoleh manfaat dari kerja sama yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjasi efisien dan efektif apabila dilakukan bersama.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kerja sama adalah kesepakatan yang terjalin antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, membagi dan melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing pihak dengan sistem saling menguntungkan satu sama lain dan menanggung resiko bersama.

2. Langkah-Langkah Kerja Sama

Kerja sama memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kerja sama juga merupakan satu pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan menurut Indrajit dan Djokopranoto (2003:800) sebagai berikut:

- a. Pengenalan masalah;
- b. Seleksi masalah;
- c. Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART;
- d. Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerja sama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dll;
- e. Menumbuhkan kerja sama yang menyangkut bentuk kerja sama, tujuan, dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dll. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan;
- f. Menyusun rencana kerja yaitu, pembuatan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab;
- g. Melaksanakan kegiatan terpadu yaitu menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dll.
- h. Pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas jika suatu kerja sama memang harus dilakukan dengan memenuhi syarat agar kerja sama yang dijalin dapat berjalan dengan waktu yang lama dan adanya suatu pandangan diantara *stakeholder* terkait sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.

3. Model dan Jenis Kerja Sama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menentukan pola kerja sama sebagai berikut:

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma adalah hubungan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha besar atau menengah yang bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan besar melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil dalam bentuk penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, pembiayaan, dan pemasaran hasil produksi.

b. Pola Subkontrak

Pola Subkontrak adalah hubungan kerja sama usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola subkontrak ini adalah pada besarnya ketergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.

Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal:

- 1) Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
- 2) Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku;
- 3) Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- 4) Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan;
- 5) Pembiayaan.

c. Pola Modal Ventura

Pola model Ventura dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan”, namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

Sulistiyani (2004:94) membedakan model-model kerja sama dengan didasari oleh fenomena biologis yang ada di dalam khasanah kehidupan organism ke dalam pemahaman kerja sama yang kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Kerja Sama Semu

Kerja sama semu merupakan persekutuan yang terjasi antara dua pihak atau lebih, namun dalam kerja sama tersebut keseimbangan antar mitra tidak seimbang, bahkan ada suatu pihak tertentu yang memahami secara benar akan

makna sebuah kerja sama yang dilakukan dan untuk tujuan apa kerja sama dilakukan serta disepakati. Dalam kerja sama ini semua pihak yang bekerjasama sama-sama merasa penting untuk melakukan kerja sama, akan tetapi pihak-pihak yang melakukan kerja sama belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaat yang dihasilkan.

b. Kerja Sama Mutualistik

Kerja sama ini merupakan hubungan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek penting melakukan kerja sama, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, serta sama-sama memahami tujuan dan makna dari kerja sama yang dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing mewujudkan visi misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lainnya. Pemikiran itu diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

c. Kerja Sama Konjungsi

Kerja sama yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kerja sama model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Suatu proses implementasinya, kerja sama yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kerja sama yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang berkerjasama. Menurut Wibisono (2007), kerja sama yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya:

a. Pola Kerja Sama Kontra Produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *stakeholder* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman di tengah masyarakat. Biasanya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

b. Pola Kerja Sama Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai objek dan masalah di luar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kerja sama ini masih mengacu

pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefi* di pihak pemerintah. Kerja sama lebih mengedepankan aspek karikatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kerja sama masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

c. Pola Kerja Sama Produktif

Pola kerja sama ini menempatkan mitra sebagai subjek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based partnership*, dimana mitra dilibatkan diberi kesempatan menjadi bagian dari *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan dari ahli diatas tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kerja sama mempunyai beberapa model yang dimana pada intinya kerja sama merupakan hubungan diantara beberapa *stakeholder* yang saling melengkapi dan mempunyai fungsi serta tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian atau bagian dari *stakeholder* tersebut. Kerja sama pada dasarnya menghubungkan aktivitas beberapa *stakeholder*, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu kesamaan dalam visi dan misi organisasi sehingga dalam melakukan interaksi dan koordinasi berjalan dengan baik.

4. Keberhasilan dalam Kerja Sama

Pada hakikatnya kerja sama dapat dimaknai sebagai adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini maka terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Menurut Rames dan Bowo (2007) dalam Khoirunnisaa' (2016:40) apabila ada satu dari ketiga unsur dimaksud tidak termuat dalam objek yang dikaji maka dapat dianggap bahwa objek tersebut tidak terdapat kerja sama.

Kerja sama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keenan (2008:33) bahwa bentuk perjanjian (*form of agreement*) dibedakan atas:

- a. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis;
- b. *Written Agreement*, yaitu pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Rendal dan Yablonsky dan Warsono (2008:112-115) juga mengemukakan bahwa kerja sama hanya dapat berhasil apabila:

- a. Dimulai dengan membangun suatu dasar yang kuat untuk bekerjasama. Hal ini dapat diwujudkan dengan: (1) bersikap *inclusive*. Kerja sama biasanya diinisiasi oleh beberapa orang kunci atau kelompok. Namun adalah sangat penting melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) atau pemangku kepentingan. Keterlibatan ini akan mendorong semangat untuk berkomitmen mensukseskan kerja sama tersebut karena pihak yang terlibat merasa turut mengikuti rencana kerja tersebut. Sebaliknya sikap eksklusif yaitu hanya melibatkan orang atau kelompok tertentu saja akan mendatangkan resistensi karena ada rasa saling curiga dan tidak saling percaya. Kata pendeknya, program kerja sama akan menjadi lebih baik dan sukses apabila diikutsertakan atau dilibatkan sejak awal. (2) libatkan elite yang dipilih rakyat (*elected officials*). Perlu diperhatikan untuk melibatkan wakil rakyat atau pejabat yang dipilih rakyat sejak awal karena posisi mereka sangat menentukan. Mereka dapat mempengaruhi keputusan khususnya keputusan tentang pembiayaan atau anggaran kerja sama.

Program kerja sama dapat dibatalkan oleh mereka, bila mereka tidak dilibatkan kerja sama sejak awal. (3) libatkan pegawai pelaksana. Pegawai yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menanganinya harus dilibatkan sejak awal karena merekalah yang akan menangani dan menjaga kelangsungan kerja sama itu. Sikap, kepentingan bahkan persepsi mereka tentang kerja sama harus diperhatikan dan dijaga dukungannya.

- b. Senantiasa menjaga semangat kerja sama (*maintain a cooperative spirit*). Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap yang selalu proaktif, fleksibel, dan sabar, serta selalu berfikir dalam konteks regional yang luas dan tidak sempit pada daerahnya sendiri. Semangat kerja sama ini harus diturunkan dari generasi ke generasi agar kepentingan bersama tingkat regional tetap dibela dan terpelihara.
- c. Bekerja dengan hati-hati karena melibatkan berbagai pihak dari daerah lain yang diambil harus dengan hati-hati seperti melakukan studi atau penelitian lapangan, memilih program yang realistis, memberi perintah sampai secara rinci, menjaga hubungan yang tidak sehat seperti memupuk hubungan tidak formal secara berlebihan sehingga membuat kerja sama menjadi tidak terkontrol dan tidak efektif.
- d. Alokasi biaya secara adil (*allocated costs fairly*) kerjasama itu sendiri memang bebas biaya, tetapi program kerja sama membawa implikasi biaya, bahkan tidak sedikit. Tetapi karena dipikul bersama, maka semestinya biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang ditanggung sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah. Kalau hal ini tidak terjadi, rasa keadilan mulai terusik dan resistansi terhadap kerja sama akan muncul. Prinsip *win-win solution* harus dipegang teguh untuk menyelenggarakan kerja sama ini. Masing-masing daerah harus mengambil manfaat dengan mengorbankan daerah yang lain. Tentu resiko harus ditanggung bersama apabila terjadi kegagalan.
- e. Tangani persoalan yang dihadapi secara serius. Memang program kerja sama bersifat sukarela tetapi tidak berarti tidak perlu serius menangani program tersebut. Karena itu harus dirumuskan bidang-bidang tanggung jawab setiap pihak secara jelas agar masing-masing tidak merasa terusik tanggungjawabnya dan secara serius menangani persoalan yang dihadapi dalam program kerja sama.

Dari penjelasan ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama akan berjalan apabila ada dua pihak atau lebih melakukan kesepakatan, adanya interaksi antara pemangku kepentingan, dan tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan bersama. Kerja sama akan berhasil apabila melakukan beberapa hal yaitu diantaranya melakukan perjanjian sebelum kerja sama sehingga tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* dapat diketahui dan dilaksanakan dengan baik,

sehingga dalam melakukan kerja sama baik mendapatkan keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Semua hal dalam kerja sama dilakukan secara adil dan hati-hati, sehingga tidak akan menguntungkan ataupun merugikan salah satu *stakeholder* saja.

D. Stakeholder

1. Pengertian Stakeholder

Stakeholder didefinisikan oleh Sumarto (2009:29) sebagai individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi baik positif atau negatif oleh suatu kegiatan program pembangunan. Sedarmayanti (2007:4) mengelompokkan *stakeholder* dalam unsur-unsur pemerintahan menjadi tiga kategori, antara lain:

- a. Negara atau pemerintah yang berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik.
- b. Sektor swasta berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar. Sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban politik, sosial, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri.
- c. Masyarakat yang terdiri dari individu maupun kelompok berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik dengan aturan formal maupun tidak formal.

Menurut Wakka (2013:4) *stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. Dari pernyataan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan/program yang saling ketergantungan dan mempengaruhi untuk mencapai kegiatan/program tersebut.

2. Peran Masing-Masing Stakeholder dalam Keja Sama

Sutawi (2004:223-225) menjelaskan berbagai peran dari pelaku kerja sama yaitu sebagai berikut:

a. Peranan pengusaha besar (Pihak Swasta)

Pengusaha besar melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil/koperasi dalam hal:

- 1) Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM pengusaha kecil/koperasi, baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan teknis produksi.
- 2) Menyusun rencana usaha dengan pengusaha kecil/koperasi mitranya untuk disepakai bersama.
- 3) Bertindak sebagai penyanggah dana atau penjamin kredit untuk permodalan pengusaha kecil/koperasi mitranya.
- 4) Memberikan bimbingan teknologi kepada pengusaha kecil/koperasi.
- 5) Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama yang disepakati.

- 6) Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha kecil/koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 7) Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik.
- 8) Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan.

b. Peranan Pengusaha Kecil/Koperasi (Peternak Ayam)

Pengusaha kecil/koperasi dalam melaksanakan kerja sama didorong untuk melakukan:

- 1) Bersama-sama dengan pengusaha besar mitranya melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
- 2) Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan pengusaha besar mitranya.
- 3) Melaksanakan kerja sama antar sesama pengusaha kecil yang untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi kepada pengusaha besar mitranya.
- 4) Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis produksi dan usaha.

c. Peran Pembina (Pemerintah)

Pembina disini bukan hanya pemerintah, tetapi dapat pula berasal dari unsur-unsur lembaga non-pemerintah/LSM maupun lembaga lainnya. Peranan lembaga pembina ini pada intinya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kemitraan usaha serta terwujudnya kemitraan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkerjasama. Secara lebih rinci peran lembaga pembina tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan pembinaan dan kemampuan kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil/koperasi.
- 2) Membantu penyediaan fasilitas permodalan dengan skim-skim kredit lunak dengan prosedur yang sederhana sehingga mampu diserap dan dimanfaatkan oleh pengusaha.
- 3) Mengadakan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha, khususnya usaha yang dikembangkan dengan kemitraan usaha.
- 4) Melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi banding, dan sebagainya.
- 6) Bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

E. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyelenggara pemerintah desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 2 yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Hak dan kewajiban desa dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 yaitu:

- a. Desa berhak:

- 1) Mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

F. Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal

Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi, pemerintah daerah dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta untuk bekerjasama atau bermitra dalam mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah dalam tataran perencanaan pembangunan, perlu menghidupkan partisipasi masyarakat lokal dan pihak swasta. Sehingga pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu konsep pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah menurut Blakley (1989:69) dalam Widyatmoko (2017:24) terdapat paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut;

Tabel 3 Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja	Perusahaan mengembangkan pekerjaan yang cocok dengan kondisi penduduk daerah
Unggulan Pengembangan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokal	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan komparatif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber Daya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Widyatmoko (2017:24)

Dilihat dari kesempatan kerja pada konsep lama semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja, sedangkan pada konsep baru dimana perusahaan mengembangkan pekerjaan yang cocok dengan kondisi penduduk daerah, sehingga penduduk daerah sekitar mempunyai passion pada pekerjaan yang dikembangkan oleh perusahaan terkait. Pada keunggulan pengembangan konsep lama lebih pengembangan pada sektor ekonomi dan pada konsep baru mengembangkan lembaga ekonomi baru sehingga lembaga ekonominya tidak tertuju pada satu sektor saja. Aset lokal pada konsep lama mengunggulkan komparatif pada aset fisik sedangkan konsep baru yaitu keunggulan komparatif didasarkan pada kualitas lingkungan dengan mengunggulkan aset fisik saja tidak cukup karena pada aset lingkungan juga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Blakely juga mengemukakan bahwa pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya, ini sejalan dengan yang diungkapkan Blakely (1989:77) dalam Widyatmoko (2017:25):

“local government has all of the essential resources it needs to effect economic and employment outcomes. Assembling existing resources into a coherent strategy and identifying the necessary resources such as specific finances for particular project or activity, requires that councils develop a new orientation toward their role and responsibility. Several courses of action or options are open to councils as they determine the appropriate way to respond to the unique circumstances of their locality. These are discussed next as examples of direction that council policy makers must discuss and decide upon”.

(Pemerintah daerah memiliki semua sumber daya penting yang dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil ekonomi dan employment, perangkaian sumberdaya yang menjadi strategi yang koheren dan mengidentifikasi sumberdaya yang ada menjadi strategi yang koheren dan mengidentifikasi sumberdaya eksternal yang tertentu, mengharuskan dan mengembangkan orientasi baru terhadap peran dan tanggung jawab mereka. Beberapa program tindakan atau opsi terbuka untuk dewan karena mereka menentukan cara tindakan atau opsi terbuka untuk dewan karena menentukan cara yang tepat untuk menghadapi situasi yang unik dari wilayah mereka. Ini dibahas selanjutnya sebagai contoh dari arah bahwa para pembuat kebijakan dewan harus membahas dan memutuskan.

Pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya adalah proses dengan pola kemitraan yang dilaksanakan pemerintah daerah, masyarakat dan sektor bisnis dalam mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pengembangan ekonomi lokal bukan hanya retorika baru tetapi mewakili suatu perubahan fundamental pada aktor dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Blakely (1989:60) dalam Widyatmoko (2017:26):

“Local Economic Development as: natural resources, labour, capital, investment, enterpreneurships, transport, communication, industrial composition, technology, size, export market, international economic, situation, local goverment capacity, national government and state spending, and development support, all of these factors ay be important but it is the segregation of development theory and local economic ection”. (Pembangunan Ekonomi Lokal sebagai: sumberdaya, tenaga kerja, modal, investasi, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi industri, ukuran teknologi, pasar ekspor, situasi ekonomi, internasional, kapasitas, pemerintahan daerah, belanja pemerintahan negara dan nasional dan dukungan pembangunan. Mungkin semua faktor ini penting. Namun praktisi pembangunan ekonomi tidak pernah menjelaskan mana yang memiliki bobot terbesar dalam situasi tertentu).

Dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana kerjasama antar *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan aktif dan dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal

Blakely (1987:94) dalam Widyatmoko (2017:26) menjelaskan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) bertujuan untuk meningkatkan nilai dari masyarakat dan wilayah, serta memberdayakan orang-orang lokal, industri lokal dan pemerintah lokal. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) adalah dengan telaksananya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam satu proses kemitraan, meningkatkan angka lapangan pekerjaan yang berpeluang bagi masyarakat lokal, terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, bertumbuhnya pembangunan ekonomi, berkurangnya pengangguran,

menurunnya tingkat kemiskinan dan terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat yang mandiri.

3. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal (LERD)

Dari konsep *Local Economic Development* (LED) berkembang melahirkan konsep *Local Economic Resource Development* (LERD) yang lebih menitikberatkan pada sumber daya lokal, hal ini disampaikan oleh Said (2016) dalam Widyatmoko (2017:28) sebagai berikut:

- a. Pengertian lokal tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.
- b. Diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah. Perwilayahan komoditas, tataruang, atau regionalisasi ekonomi.

Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian tersebut meliputi sumberdaya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*human resources*). Sumber daya alam yang merupakan komponen-komponen dari unit lahan yang menggunakan secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal dengan keadaan ekologi digunakan menghasilkan produksi tertentu. Sedangkan sumber daya manusia yang dimaksud adalah kewirausahaan, tenaga kerja, dan sumber daya institusi (FAO, 1995).

LED dan LERD mempunyai perbedaan mendasar seperti yang dikatakan oleh Said (2016) dalam Widyatmoko (2017:29) yaitu LERD lebih menitikberatkan pada usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Berangkat dari definisi diatas LERD merupakan suatu konsep kewilayahan yang memberikan upaya dari

pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerahnya dengan cara mengoptimalkan potensi lokal yang ada untuk menunjang pencapaian pembangunan. Pola koordinasi yang dari LERD ini melibatkan *stakeholder* yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi daerah. *Stakeholder* inilah yang kemudian melaksanakan atau melakukan usaha dalam melakukan pengembangan potensi sumber daya ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Stakeholder* yang mengkoordinir kegiatan mempunyai kapasitas tersendiri atau sesuai bidangnya.

Ada beberapa kelembagaan dan *stakeholder* yang terlibat dalam Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal. Said (2016) dalam Widyatmoko (2017:30) menjelaskan lebih terperinci bahwa peran yang dimaksud mencakup peran aktif dalam proses maupun *stakeholder* yang berperan sebagai pendukung terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal. Selanjutnya menurut Said (2016) dalam Widyatmoko (2017:30-31) menjelaskan berdasarkan konsep LERD, *stakeholder* yang terlibat dalam proses ini adalah:

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu aktor utama dalam pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Tugas utama pemerintah daerah adalah membangun daerah dan menuntun agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah daerah mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pembuatan regulasi sebagai dasar pelaksanaan konsep ini pada tingkat daerah.

Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam penyediaan infrastuktur penunjang serta mengkoordinir pengelolaan sumber daya yang ada di daerah.

b. Pelaku Usaha Lokal dan Baru

Pengelolaan sumber daya ekonomi lokal oleh para pelaku usaha merupakan upaya dalam meningkatkan nilai jual sumber daya yang ada dan mendistribusikan keluar daerah asal. Para pelaku usaha juga harus berinovasi dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal yang sudah ada. Pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru, keduanya mempunyai peran dalam mengembangkan sumber daya ekonomi lokal dan mendukung dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai fungsi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan serta menyusun kebijakan dalam investasi, promosi, dan pelaksanaan perijinan terpadu. Tugas BUMD yaitu mendorong masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi masyarakat, dan menjadi perintis kegiatan perekonomian di masyarakat.

d. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal melaksanakan pembangunan dan juga merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan masyarakat melaksanakan dalam mengelola sumber daya lokal. Masyarakat yang dimaksud adalah meliputi individu atau kelompok pengelola, yang megawasi jalannya pembangunan, dan masyarakat yang berkerjasama dengan pihak lain.

e. Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi mempunyai peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial, aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Penjelasan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan dalam LERD koperasi berupaya untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dalam pengembangan sumber daya ekonomi lokal dengan mengembangkan kualitas dan kuantitas anggota dalam pengelolaan potensi daerah.

f. Lembaga Keuangan Daerah

Lembaga keuangan ini dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Peran dari lembaga keuangan daerah ini adalah menyediakan modal dalam menunjang proses pengelolaan sumber daya ekonomi lokal. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih lembaga keuangan pemerintah maupun daerah yang akan digunakan.

g. Perguruan Tinggi

Dalam kajian ini perguruan tinggi bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebijakan dan regulasi yang disusun oleh pemerintah akan tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan. Perguruan tinggi bersifat netral, tidak memihak kepada pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa konsep Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal dapat terealisasi dengan baik apabila ada koordinasi antara pihak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi. Kerja sama yang dilakukan antara *stakeholder* tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat. Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan sumber daya lokal yang ada di daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:205) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini memberikan gambaran secara tepat dan menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan masalah kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menunjukkan adanya masalah kerja sama antara *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, antara lain, Pemerintah Desa Kedawung, Pihak Swasta, dan Masyarakat Desa Kedawung yang menjadi mitra usaha. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.



Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti untuk menggunakan metode kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suwandi (2008:8), antara lain:

1. Penelitian kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif.
2. Permasalahan yang diteliti itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan sifat atau pengalaman seseorang dengan suatu fenomena.

Berdasarkan alasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dengan penelitian deskriptif peneliti dapat mengetahui gambaran secara jelas mengenai kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur pada Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan di lapangan adalah metode kualitatif dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2016) yaitu: pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden. Ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Mantra, 2008:29).

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang detail dan mendalam

terkait bagaimana proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar serta kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi. Sedangkan jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif, Mantra (2008:40) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:207), fokus penelitian adalah batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Menurut Moleong (2009:97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian penelitian akan memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti.

Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Proses kerja sama yang terjalin antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. dalam pelaksanaan proses kerja sama ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kerja sama antara *stakeholder* yang terlibat, sehingga dalam fokus ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Peran masing-masing *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam proses kerja sama.
 - b. Bentuk kerja sama yang terjalin antar *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
 - c. Proses kerja sama yang terjalin antar *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
 - d. Hasil kerja sama yang terjalin antar *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
2. Kendala-kendala dan cara mengatasi kendala dalam proses kerja sama yang terjalin antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
 - a. Kendala (Modal, Sumber Daya Manusia, Lahan, Perencanaan Usaha dan Tidak Stabilitasnya Harga Telur).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana berlangsungnya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-

benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti diharapkan mendapatkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, termasuk lokasi, lingkungan, lingkungan serta kegiatan yang berada didalamnya.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena Kecamatan Nglegok merupakan termasuk lima besar dalam penghasil produksi telur terbesar di Kabupaten Blitar. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan dari obyek yang akan diteliti, yaitu Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, masyarakat, dan pihak swasta.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi mengenai data dari sebuah penelitian. Menurut Moleong (2007:112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti dokumen, fenomena/peristiwa, dan orang lebih lanjut dijelaskan bahwa sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan orang-orang yang paham dalam bidang ini. Berdasarkan jenisnya, sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi-informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data

primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan yang berada pada tempat yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian antar lain:

- a. Kepala dan Sekretaris UD. Gemilang.
- b. Masyarakat peternak ayam ras petelur.

No.	Nama	Umur (tahun)	Waktu Beternak	Jumlah Ternak
1.	Mahmudi	38	6 tahun	4.000
2.	Fitriani	37	7 tahun	2.000
3.	Sulikah	36	6 tahun	4.000
4.	Sunarto	45	5 tahun	1.500
5.	Santoso	52	7 tahun	2.500
6.	Nikmah	40	8 tahun	2.000
7.	Sugeng	45	10 tahun	10.000

- c. Kepala dan Sekretaris Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk memperkuat hasil dari penelitian. Data sekunder ini secara tidak langsung akan memberikan informasi bagi peneliti yang merupakan hasil dari kegiatan orang lain, dengan kata lain data sekunder didapat bukan dari usaha yang dilakukan oleh peneliti sendiri, melainkan dari orang lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh berupa data-data arsip dari Kantor Desa Kedawung seperti RPJMDes, gambaran umum lokasi dan situs penelitian, dokumen atau dokumentasi kegiatan pembangunan, serta gambar-gambar hasil dari pembangunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melakukan pengumpulan data di penelitian ini, untuk melengkapi dan menunjang validitas data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti disini yaitu dengan mendatangi langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Peneliti menyusun dan merencanakan beberapa pertanyaan tertulis.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dan mencatat hal-hal penting yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sugiyono (2008:229) objek observasi terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b. *Actor*, seorang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c. *Activity*, kegiatan yang sedang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan, yaitu di Kantor Desa Kedawung, UD. Gemilang, dan masyarakat Desa kedawung

yang berprofesi sebagai peternak ayam ras petelur, serta mengamati apa yang terjadi dan mengkaji data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, mencatat, serta mempelajari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting. Dokumentasi merupakan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dan dapat membantu penelitian. Disini peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa kegiatan yang dilakukan di lapangan seperti saat peneliti melakukan wawancara, kegiatan pendistribusian pakan oleh UD. Gemilang, dan kegiatan peternak lainnya.

4. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

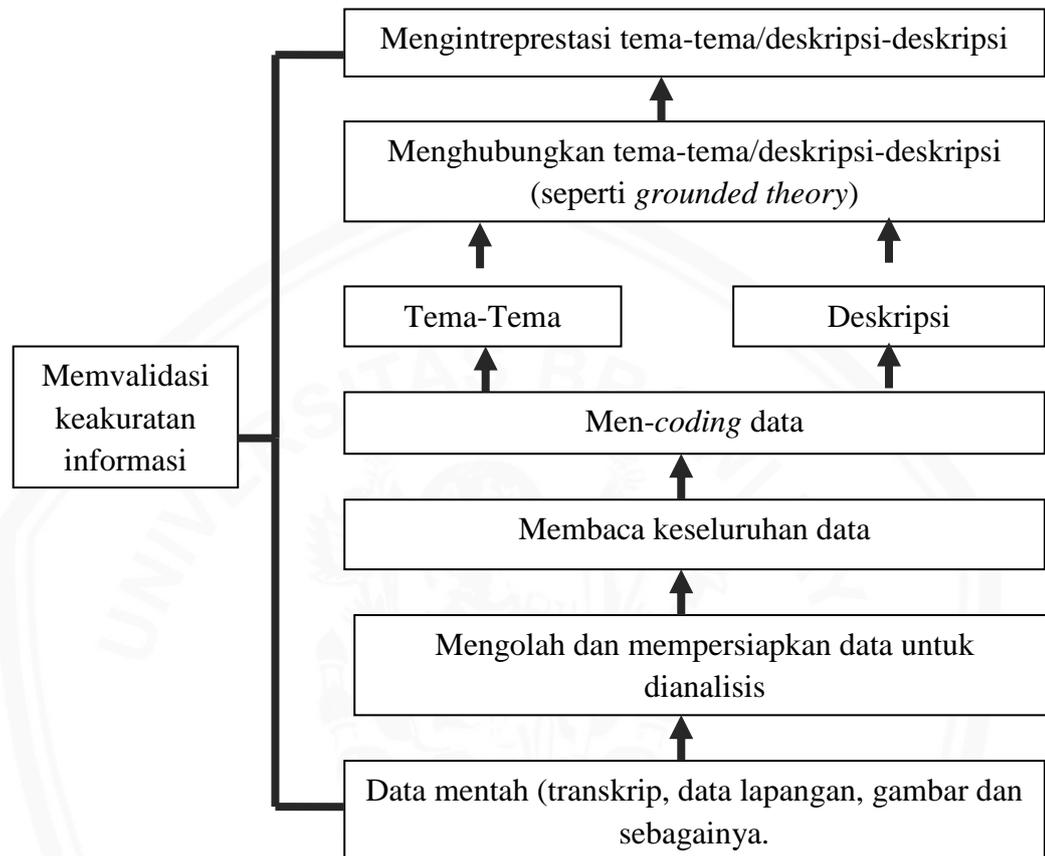
Instrumen penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif, terutama hal hal pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam rangka pengumpulan data. Selain itu pula dalam penelitian kualitatif selain peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, juga dibantu oleh sarana-sarana instrumen lain guna pengembangan dari penelitian, diantaranya:

1. Peneliti. Dimana peneliti merupakan instrumen utama dalam sebuah penelitian. Peneliti sebagai instrumen dapat melakukan hubungan secara langsung dengan responden dan dapat menilai serta memahami bagaimana bentuk dan interaksi yang terjadi di lapangan. Moleong (2007:168) mengatakan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya sendiri.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian;
3. Catatan lapangan (*fieldnotes*) digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Catatan lapangan ini peneliti kemas dalam buku catatan untuk arsip dari pelaksanaan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244). Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan (Crewell, 2012:275). Teknis analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dengan

mengikuti konsep Creswell. Creswell memberikan enam tahapan dalam poses analisis data. Berikut adalah enam tahapan proses analisis data sebagai berikut:



Gambar 1 Analisis Data Model Creswell

Sumber: Creswell, 2012:277

Creswell mengemukakan bahwa terdapat enam alur kegiatan dalam analisis data, sebagai berikut:

1. Mengelola data dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data sesuai jenisnya berdasarkan sumber informasi. Pada tahap ini, peneliti akan mempersiapkan data yang relevan dengan kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum yang terkandung dalam pernyataan informan, bagaimana inti dari gagasan-gagasan tersebut, bagaimana penuturan informasi tersebut. Pada tahap ini, para peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur.

3. Menganalisis lebih detail dengan men-*coding* data

Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat dan paragraf atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari informan. Pada tahap ini, peneliti memilah-milah data penelitian yang termasuk dalam sub tema (a) kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, (b) kendala dan cara mengatasi kendala dalam proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

4. Menetapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi dan peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis meliputi: pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu atau keterhubungan antar tema. Para peneliti dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan tentang kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

6. Menginterpretasi atau memaknai data

Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Pada tahap ini, peneliti akan memberikan intpretasi penulis dan mengkaitkannya dengan teori atau literatur terkait dengan kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

H. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan reabilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah yang dikembangkan oleh Denzim dalam Moleong (2007:331). Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Menurut Patton dalam Moleong (2007:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara lebih dari satu orang, dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan, dari jawaban-jawaban informan yang memiliki kesamaan maka data yang diperoleh peneliti dianggap valid.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57 – 8 9'51 LS berada di Barat Daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 Km dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga dibelah aliran sungai brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar Selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik potensi dan kekayaan yang dimiliki kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber alam, produksi hasil

bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.



Gambar 2 Peta Kabupaten Blitar

Sumber: www.blitarkab.go.id

2. Iklim dan Topografi Kabupaten Blitar

Lokasi Kabupaten Blitar berada disebelah selatan Katulistiwa. Tepatnya terletak antara $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$ Lintang Selatan.

Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendah 1.024,7 mm per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30° Celcius dan suhu terendah 18° Celcius. Perubahan iklimnya seperti daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan potensi alam, geografis, dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya partisipasi, kesadaran, dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak Topografi tinggi tempat tertinggi adalah 800 mdpl dan tinggi tempat terendah adalah 40 mdpl.

3. Visi dan Misi Kabupaten Blitar

a. Visi

Pemerintah Kabupaten Blitar dibawa kepemimpinan Drs. H. Rijanto, mm dan Marhaenis Urip Widodo, S.Sos selama periode 2016-2021 menetapkan visi “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERDAYA SAING”. Yang mana jika dijabarkan akan memiliki arti sebagai berikut:

1) Lebih sejahtera

Berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman, dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

2) Maju

Dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3) Berdaya Saing

Yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Blitar tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi, dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;

- 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah, dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Makna Lambang Kabupaten Blitar



Gambar 3 Lambang Kabupaten Blitar

Sumber: www.blitarkab.go.id

Lambang daerah Kabupaten Blitar terdiri dari sembilan bagian dengan bentuk, macam, dan maknanya sebagai berikut:

- a. Bentuk seluruhnya merupakan segi lima : Lambang Pancasila;
- b. Candi Penataran : peninggalan kerajaan majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur;
- c. Keris pusaka : lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, sejak masa dahulu hingga sekarang;
- d. Sungai brantas dengan warna biru diatas dasar warna hijau dan kuning : lambang kemakmuran, membagi daerah Blitar menjadi dua bagian sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang makmur.
- e. Pangkal keris dengan bentuk gunung dengan api yang menyala-nyala : lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa dan patah semangat, malah semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang menghadapi malapetaka;
- f. Pohon beringin : lambang pengayoman pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat demi keadilan;

- g. Padi kapas : lambang sandang dan pangan kemakmuran, buah kapas 8 dan butir padi 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolusi 17-8-1945;
- h. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar : lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

B. Profil Desa Kedawung

1. Sejarah Desa Kedawung



Gambar 4 Kantor Desa Kedawung

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada umumnya setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali dikaitkan dalam dongeng-dongeng yang diwariskan dari generasi yang tua ke generasi yang lebih muda dan bahkan sejarah desa atau daerah diceritakan dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral dan keramat. Sejarah Desa Kedawung memiliki latar belakang sebagaimana kisah diatas dan tertuang dalam kisah-kisah sebagai berikut:

a. Asal-Usul Wilayah

Menurut cerita dari masyarakat, Desa Kedawung merupakan satu kesatuan dari ketiga buah dusun yaitu Dusun salam, Dusun kedaung, dan Dusun Sidodadi. Asal nama Dusun Salam menurut cerita para sesepuh desa disebabkan karena daerah tersebut banyak terdapat pohon salam. Demikian pula dengan asal muasal Dusun Kedawung, karena pada are tersebut terdapat banyak pohon kedawung. Mengenai riwayat Dusun Sidodadi adalah merupakan tanah bekas perkebunan kolonial Belanda.

2. Karakteristik Wilayah

Secara geografis Desa Kedawung terletak pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 450 mdpl. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan rata-rata mencapai 811,41 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan November hingga mencapai 2.080 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2013.

Secara administratif, Desa Kedawung terletak di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Sumberasri
Sebelah Barat	: Desa Candi Rejo Kec. Ponggok
Sebelah Selatan	: Desa Ngoran
Sebelah Timut	: Desa Penataran

Jarak tempuh Desa Kedawung ke ibu kota kecamatan adalah 6,2 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 12,5 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

Desa Kedawung memiliki wilayah seluas 8,33 Km² (77,9 Ha) yang terdiri dari lahan sawah (9198,5 Ha), bukan sawah (413,4 Ha), dan non pertanian (162 Ha). Sebagian besar sawah di Desa Kedawung yang terletak di Dusun Salam dan Dusun Kedawung merupakan sawah irigasi teknis dan semi teknis dengan jenis tanaman berupa padi di musim penghujan dan jagung, sayur-sayuran, serta kacang tanah di musim kemarau. Lahan pertanian ini masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena pengelolaannya masih belum dikerjakan secara optimal. Selain itu di Desa Kedawung juga banyak dijumpa tanaman tebu.

3. Visi dan Misi Desa Kedawung



Gambar 5 Balai Desa Kedawung
Sumber: Dokumentasi Peneliti

a. Visi

Adapun visi Desa Kedawung yaitu **“Terwujudnya masyarakat Kedawung yang berakhlak mulia, maju, berdaya saing, sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat”**. Secara khusus dijabarkan makna dari visi

pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju si masa mendatang oleh segenap warga Desa Kedawung. Dibuatnya visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Kedawung yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi

Hakekat misi Desa Kedawung merupakan turunan dari visi Desa Kedawung. Misi merupakan tujuan jangka pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Kedawung merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Kedawung.

Untuk meraih visi Desa Kedawung seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Kedawung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
- 4) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- 5) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berkarya dan meningkatkan pendapatannya.
- 7) Menata Pemerintahan Desa Kedawung yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengembangkan amanat masyarakat.
- 8) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan peningkatan kinerja aparatur desa yang bersih, tertib, bertanggungjawab dan mudah.
- 9) Peningkatan kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan.
- 10) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan *entrepreneur* (wirausahawan)

4. Kondisi Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Kedawung, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Kedawung, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasa para peserta (kandidat) adalah mereka yang secara tradisi memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013. Pada pemilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir

70%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bagi masyarakat Desa Kedawung seperti acara perayaan desa.

Pada bulan November 2014, masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Presiden secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah daripada pemilihan kepala desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Kedawung.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan damai. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Kedawung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta diatas, dapat dipahami bahwa Desa Kedawung mempunyai dinamika publik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika

politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Kedawung kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana masyarakat Jawa sangat terasa di Desa kedawung. Misalnya dalam kegiatan agama Islam, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa dan/atau Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi skulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Kedawung. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di desa Kedawung tentunya hal ini membuthkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik politik.

Dalam catatan sejarah selama ini pernah terjadi bencana alam meletusnya gunung kelud yang terjadi tahun 1901, tahun 1919, tahun 1951, tahun 1966, tahun 1990, dan tahun 2014 hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian warga masyarakat Desa Kedawung.

5. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kedawung Rp. 55.000,-. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Kedawung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.065 orang, di sektor peternakan berjumlah 1.624 orang, yang bekerja di sektor industri 27 orang, yang bekerja di sektor industri 27 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 96 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.069 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4 Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Pertanian	1256 orang	40,9%
2.	Jasa/Perdagangan		
	a. Jasa Pemerintahan	121 orang	3,9%
	b. Jasa Perdagangan	197 orang	6,4%
	c. Jasa Angkutan	167 orang	6,4%
	d. Jasa Ketrampilan	108 orang	3,5%
	e. Jasa Lainnya	457 orang	14,9%
3.	Sektor Industri	254 orang	8,3%
4.	Sektor lain	509 orang	16,6%
	Jumlah	3.069 orang	100%

Sumber: RPJMDes Desa Kedawung Tahun 2014-2019

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Desa Kedawung memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di setiap dusun yang meliputi sarana prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

a. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Kedawung mempunyai kantor dan balai desa di Dusun Kedawung yang kondisinya perlu perbaikan dan penambahan mebel. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kedawung mempunyai sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai sekolah dasar (SD) yang terdapat di beberapa dusun. Desa Kedawung mempunyai dua sekolah PAUD, dua sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), dan empat SD yang terdiri dari tiga SD Negeri dan satu SD Swasta.

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di desa Kedawung mempunyai Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) pembantu yang kondisinya baik dan baru dibangun dengan satu orang bidan desa. Selain itu, di Desa Kedawung juga terdapat tujuh posyandu balita dan satu posyandu lansia yang tersebar semua dusun dengan kader posyandu berjumlah 35 orang.

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Kedawung mempunyai 6 buah masjid dan 26 buah mushola yang tersebar di tiga dusun.

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Kedawung berupa jalan desa, jalan kosong dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makadam bahkan masih berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan desa, jalan kampung, dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2014-2019.

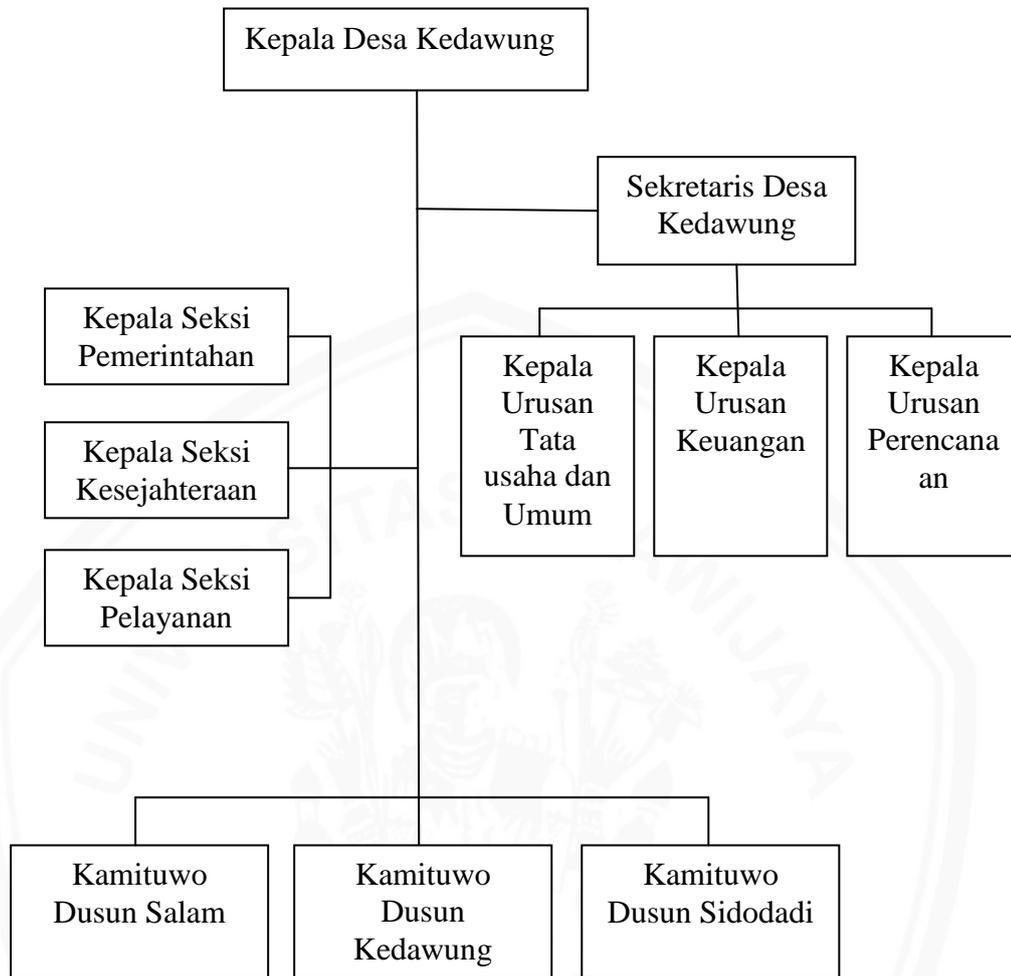
7. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Kedawung terdiri dari tiga dusun yaitu salam, kedawung, dan sidodadi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kedawung dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun tetangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Kedawung memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.



Gambar 6 Struktur Organisasi Desa Kedawung
 Sumber: Arsip Desa Kedawung 2017 diolah Peneliti

C. Profil UD. Gemilang

1. Sejarah Singkat UD. Gemilang Blitar

UD. Gemilang berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh Bapak Imam Makhfud. Pendirian UD. Gemilang ini dilatarbelakangi oleh banyaknya usaha peternakan ayam petelur yang menyebabkan terjadinya defisit pasokan pakan ternak Kabupaten Blitar. Pada saat terjadi defisit inilah usaha dagang ini dirintis.



Awal mula didirikan, usaha ini menekuni bidang produksi pakan ternak (jagung) dengan bermodal sebuah mobil *pick up* dan menjalin kerja sama dengan petani.

Pada tahun 2005, usaha ini semakin berkembang. Jika sebelumnya usaha ini hanya memproduksi pakan ternak, pada tahun ini usaha ini mulai membentangkan sayapnya dengan mulai memproduksi telur dan sentrat. Karena usaha produksi telur cukup berhasil, UD ini mampu melakukan pengiriman telur ke beberapa kota besar seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Kuningan, dan beberapa kota yang berada di Jawa Timur. Bahkan permintaan akan telur yang semakin lama semakin meningkat membuat UD kewalahan memenuhi permintaan telur-telur tersebut sehingga mulai melakukan kerja sama dalam bentuk mitra dengan para peternak ayam petelur.

Tidak ada usaha yang tidak mengalami suatu hambatan dalam perjalannya, begitu pun pada UD. Gemilang pada tahun 2007 merupakan masa-masa sulit yang dihadapi. Usaha ini dihadapkan pada kenaikan harga BBM dan harga pakan ternak sedangkan harga telur turun. Namun karena kegigihan Bapak Imam Makhfud, lama kelamaan usaha ini mampu bangkit lagi. Sehingga sampai saat ini UD. Gemilang memiliki sekitar 30 armada truk yang digunakan untuk mendistribusikan hasil produksinya.

2. Lokasi

Kantor pusat UD. Gemilang berlokasi di Desa kuningan RT. 01 RW. 11 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Telepon (0342) 814704, HP 085790446555, kode pos 66171.



Gambar 7 Kantor UD. Gemilang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

3. Visi dan Misi

a. Visi

“MEMASARKAN HASIL PETERNAKAN WILAYAH BLITAR KE
JAWA BARAT”

b. Misi

- 1) Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar;
- 2) Memajukan dan mensejahterakan mitra kerja pendukung.

4. Tujuan Pendirian Perusahaan

Tujuan dari pendirian UD. Gemilang ini antara lain:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan peternak bidang perunggasan;
- b. Mengembangkan sumber daya manusia untuk memajukan usaha dibidang peternakan;
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Memajukan tingkat perekonomian daerah.

5. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

Setiap perusahaan membutuhkan sistem manajemen, salah satunya dengan membentuk sebuah struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut digunakan untuk kelancaran seluruh aktivitas perusahaan. Dibawah ini akan dijelaskan tugas dari masing-masing bagian yang terkait langsung dalam kegiatan perusahaan:

a. Direktur

- 1) Bertanggungjawab penuh terhadap maju mundurnya perusahaan;
- 2) Menentukan strategi perusahaan;
- 3) Menentukan atau memberi keputusan dalam setiap kebijakan perusahaan yang bersifat mutlak;
- 4) Membawahi semua atasan pekerja.

b. Wakil Direktur

- 1) Melaksanakan sebagian tugas pokok direktur utama;
- 2) Melaksanakan pengembangan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
- 3) Berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan yang hendak diberikan kepada langganan, menetapkan harga jual dan sistem penjualan, serta alat promosi;
- 4) Berwenang untuk memutuskan bagaimana membantu mitra bisnis dalam mengelola sistem informasi.

c. Gudang

Petugas gudang bertanggungjawab terhadap persediaan barang gudang yang meliputi jumlah dan kualitas barang selama berada di gudang.

d. PS. Manager

- 1) Bertanggungjawab atas kelancaran sistem operasional PS;
- 2) Memberikan keputusan juga solusi terhadap permasalahan yang menyangkut PS;
- 3) Memberikan informasi dan prediksi kenaikan produk PS;
- 4) Menginformasikan setiap pembelian produk kepada supplier atau pabrik secara langsung;
- 5) Menghitung persediaan barang di PS.

e. *Accounting Manager*

- 1) Melakukan pengecekan dan bertanggungjawab terhadap semua lajur transaksi keuangan perusahaan;
- 2) Menentukan dan memberikan keputusan dalam setiap kebijakan keuangan dengan kesepakatan manajer direktur;
- 3) Memastikan kepercayaan dan ketetapan proses pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada;
- 4) Melakukan analisis pembiayaan.

f. Kasir

- 1) Menerima dan menghitung pembayaran dari konsumen;
- 2) Mencatat seluruh transaksi pada hari tersebut;
- 3) Melakukan *audit stock* barang di PS bersama pegawai PS lainnya.

g. Sopir

- 1) Menghitung dan bertanggungjawab atas jumlah barang yang sudah ditata kuli di truk pengangkut barang;

- 2) Mengantar barang langsung ke peternak;
- 3) Menyertakan surat tanda terima kepada UD bila barang sudah diantar ke peternak dan sudah diterima oleh peternak.

h. Administrasi

- 1) Melakukan pembukuan terhadap semua transaksi PS;
- 2) Melakukan *cross check* dengan sistem manajer PS setiap satu minggu sekali dengan semua hasil transaksi PS. Hasil rekapan total kemudian diperiksa *manager accounting* dan di tanda tangani bila sudah dinyatakan valid.

i. Kuli

- 1) Melakukan pengambilan barang dari gudang bila terjadi pembelian barang;
- 2) Memeriksa kualitas barang yang akan diantar ke peternak;
- 3) Menata ke truk pengangkut barang dan bertanggungjawab dalam menghitung barang yang akan dikirim.

D. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, meliputi:

Peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar merupakan usaha kecil menengah yang ikut menyumbangkan pendapatan masyarakat dalam roda ekonomi di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Perkembangan peternakan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Saat ini, Kabupaten Blitar dikenal

sebagai salah satu sentra produksi telur ayam ras petelur, dengan produksi yang paling banyak terdapat di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wonodadi. Dimana Desa Kedawung merupakan bagian dari Kecamatan Nglegok yang menjadi salah satu pemasok telur terbanyak di Kecamatan Nglegok. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan produksi telur di Desa Kedawung dibutuhkan kerja sama antara *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan peternak ayam

Bentuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa dengan peternak ayam ras petelur diwujudkan seperti tugas dan fungsi dari pemerintah Desa Kedawung seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kedawung Bapak Budi Jatmiko berikut:

“sejak sepuluh tahun belakangan ini, peternakan di Desa Kedawung sangat berkembang pesat, sehingga pemerintah desa juga berusaha terus mendukung guna meningkatkan produktivitas peternak.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Bapak Sugeng selaku peternak dan ketua kelompok ternak “Unggas Jaya Desa Kedawung mengungkapkan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok ternak di desa ini mengetahui bagaimana perkembangan peternakan di Desa Kedawung ini. Saya mendirikan kelompok ternak itu mulai tahun 2008 dan pada saat itu anggota ternak berjumlah 30 orang. Semakin lama semakin berkembang pada tahun 2015 jumlah peternak di Desa Kedawung berjumlah 115 peternak. Setelah krisis yang dialami pada antara tahun 2016-2017 karena harga telur yang dibawah harga produksi sehingga peternak mengalami kerugian yang sangat besar sehingga banyak peternak di Desa Kedawung yang gulung tikar. Data terakhir yang diambil bulan Maret 2018 peternak di Desa Kedawung yang masih bertahan berjumlah 84 peternak.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Lebih lanjut Bapak Budi Jatmiko Kepala Desa Kedawung mengatakan bahwa:

“kami sebagai pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator. Dukungan yang kami berikan sebagai pemerintah desa yaitu dengan memberikan bantuan berupa peminjaman tempat yang dibutuhkan oleh kelompok ternak “Unggas Jaya” untuk melakukan kegiatan rutinannya yaitu perkumpulan selama satu bulan sekali oleh seluruh peternak di Desa Kedawung.” (wawancara pada tanggal 2 Mei 2018)

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh peternak ayam ras petelur Ibu Fitriani mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Desa tidak langsung turun tangan menangani peternak disini. Beberapa kali waktu ada yang mau melakukan sosialisasi baik dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar atau dari pihak mana pun hanya menyediakan tempat di balai desa jika dibutuhkan, hal tersebut pun juga hanya terkadang melakukan kegiatan di balai desa, lebih sering perkumpulan kelompok ternak “Unggas Jaya” melakukan kegiatan di rumah anggota.” (wawancara tanggal 30 April 2018)

Bapak Sugeng selaku peternak dan ketua kelompok ternak “Unggas Jaya” di Desa Kedawung juga mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah setempat atau pemerintah desa tidak langsung menangani masalah peternakan. Karena usaha peternakan dianggap sebagai usaha mandiri berbeda dengan pertanian lain seperti padi, pemerintah desa masih terlibat dalam pendistribusian pupuk kompos atau yang lainnya tetapi tidak sama dengan peternakan. Hal tersebut menjadikan jika melakukan kerja sama dengan pihak lain entah itu sosialisasi atau ada kontrol terhadap peternak, langsung menemui saya sebagai ketua kelompok peternak dan saya akan mengarahkan kepada peternak untuk dilakukan sosialisasi atau kontrol.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Berdasarkan data sekunder yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67, bahwa kewajiban pemerintah desa sebagai berikut:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, tetapi juga berasal dari perusahaan-perusahaan swasta seperti yang dikatakan oleh Bapak Sugeng Kepala Kelompok Ternak “Unggas Jaya” dan peternak, menyatakan bahwa:

“proses sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar saja mbak. Ada tiga sektor yang melakukan kerja sama dengan kelompok ternak kami yaitu dari Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Blitar itu sendiri, perusahaan pakan, perusahaan obat-obatan ternak, dan juga dari perbankan. Perusahaan pakan ternak yang bekerjasama dengan kami yaitu dari Charoen Pokphand, Japfa Comfeed, Wonokoyo, Cargil Indonesia, dan CJ Samsung. Kalau untuk perusahaan obat-obatan ternak kami bekerjasama dengan PT. Medion, Mensa, PT. Romindo Primavetcom, dan PT. Sanbe Farma. Perbankan yang sering melakukan sosialisasi yaitu dari BRI (Bank Rakyat Indonesia).” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Mahmudi selaku peternak, menyatakan bahwa:

“saya sebagai anggota dari kelompok ternak “Unggas Jaya” selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan banyak membantu peternak dalam mengelola peternakannya. Di dalam setiap sektor peternakan kami sebagai anggota mendapatkan informasi yang jelas dan menarik. Sosialisasi yang dilakukan pernah dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, perusahaan pakan dan obat-obatan ternak, dan perbankan.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Peternakan, perijinan usaha, dan juga kesehatan peternak dan ternaknya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Kepala Kelompok Ternak “Unggas Jaya” dan peternak di Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

“Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan beberapa kali sosialisasi, yaitu mengenai tentang Undang-Undang Peternakan, ijin usaha, dan juga kesehatan peternak dan ternaknya. Untuk Undang-Undang ternak sosialisasinya mengenai isi dari Undang-Undang tersebut. Kalau mengenai ijin usaha tentang bagaimana cara mendapatkan ijin usaha dari pemerintah dan juga apa saja syarat dan ketentuannya. Mengenai kesehatan peternak dan ternaknya Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerjasama dengan FAO dan WHO untuk mengontrol kesehatan pangan dan kesehatan ternak, yang bertugas dilapangan yaitu dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Bapak Sugeng Kepala Kelompok Ternak “Unggas Jaya” dan peternak di Desa Kedawung menambahkan bahwa:

“surat ijin usaha yang dimaksudkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yaitu diperuntukkan bagi peternak yang mempunyai ternak sebanyak 10.000 ekor ayam keatas. Mengingat bahwa di Desa Kedawung ini sebagian besar yaitu peternak rakyat yang mempunyai jumlah ternak dibawah 10.000 ekor. Hal tersebut menjadikan peternak di Desa Kedawung yang mempunyai ternak dibawah 10.000 ekor tidak wajib mengajukan ijin usaha tetapi mengajukan surat tanda daftar jadi peternak. Jadi peternak rakyat tersebut tetap terdaftar di pemerintah tetapi tidak dikenakan pajak.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Perusahaan Pakan dan Obat-obatan, dan juga dari Perbankan sangat membantu bagi perkembangan peternakan di Desa Kedawung. Disetiap usaha yang dijalankan pasti akan menemukan kendala, salah satu kendala yang dihadapi oleh peternak yaitu masalah modal usaha yang cukup besar. Bapak Mahmudi peternak ayam ras petelur menyatakan bahwa:

“peternakan ayam ini potensinya besar mbak dan juga membutuhkan modal yang besar pula. Kami perlu modal untuk membuat kandang ayam, gudang tempat pakan dan telur, dan juga kandang baterai. Maka dari itu kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi dari perbankan sehingga kami mengetahui bagaimana cara untuk meminjam modal dan syaratnya apa saja. Dan juga kami peternak sangat terbantu dengan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Desa dalam memberikan surat-surat yang

diperlukan untuk peminjaman modal ke pihak bank” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Budi Jatmiko

Kepala Desa Kedawung, bahwa:

“kalau soal permodalan, pemerintah desa tidak dapat membantu banyak karena modal yang terbilang cukup besar untuk berwirausaha sebagai peternak. Kami hanya bisa memberikan bantuan berupa mempermudah dalam pengurusan surat-surat yang diperlukan untuk peminjaman modal kepada pihak bank.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Subandi

Sekretaris Desa Kedawung sebagai berikut:

“peternak tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah desa berupa langsung modal usaha seperti itu tidak. Karena modal yang dibutuhkan untuk beternak ayam ras petelur itu sangat besar. Sebagai pemerintah yang melayani masyarakat, kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi peternak yang membutuhkan surat-surat yang digunakan untuk peminjaman modal usaha. Hal tersebut diharapkan dapat membantu bagi perkembangan peternakan di Desa Kedawung.” (wawancara tanggal 11 Mei 2018)

Pemerintah desa dalam mendukung perkembangan peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung tidak dapat diwujudkan langsung dalam bentuk bantuan dana, pelatihan ataupun sosialisasi. Pemerintah Desa Kedawung hanya memberikan dukungan dalam bentuk moral kepada masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga berusaha untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat desa untuk mendukung pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur bagi peternak.

b. Kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak swasta

Kerja sama pemerintah desa dengan pihak swasta yaitu Unit Dagang (UD) Gemilang. Pola hubungan ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Jatmiko Kepala Desa Kedawung mengungkapkan bahwa:

“pemerintah desa mengetahui kalau ada kerja sama antara peternak desa sini dengan pihak swasta. Tugas kami sebagai pemerintah desa hanya melakukan pengawasan terhadap kerja sama tersebut tanpa ikut campur dengan urusan masyarakat, sejauh kerja sama tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Hal tersebut juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Subandi selaku Sekretaris Desa Kedawung, bahwa:

“untuk kerja sama yang dilakukan antara peternak dengan swasta kami tidak ada hubungan langsung. Yang ada kami hanya mengawasi saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan swasta dan masyarakat.” (wawancara tanggal 28 Mei 2018)

Pemerintah Desa Kedawung tidak ada hubungan kerja sama apapun dengan pihak swasta UD. Gemilang. Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan peternakan di Desa Kedawung, antara pemerintah desa dan pihak swasta melakukan tugasnya masing-masing, selama itu tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Subandi Sekretaris Desa Kedawung menambahkan bahwa:

“kami sebagai pemerintah desa melakukan tugas kami untuk melakukan pelayanan yang baik, mudah, dan cepat bagi masyarakat Desa Kedawung pada umumnya dan juga masyarakat Desa Kedawung pada khususnya yang berprofesi sebagai peternak, untuk mendukung setiap kegiatan yang baik untuk perkembangan peternakan di Desa Kedawung ini.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Imam Mahfud Kepala UD. Gemilang, bahwa:

“untuk melakukan kerja sama langsung dengan pemerintah kami tidak ada ya mbak. Soalnya kami swasta, ya kami mengembangkan usaha kami sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Mungkin kalau hubungan dengan pemerintah ya Cuma soal ijin usaha itu mbak, soal membayar pajak. Selebihnya tidak ada, apalagi dengan Pemerintah Desa Kedawung kami tidak melakukan kerja sama sama sekali di dalamnya. Kami sebagai pihak swasta hanya berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat Desa Kedawung saja.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Ibu Puji Selaku Sekretaris UD. Gemilang juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa:

“tidak ada kerja sama yang terjalin antara UD. Gemilang dengan Pemerintah Desa Kedawung. Kami melaksanakan tugas kami sebagai pihak swasta dalam upaya mengembangkan peternakan di Desa Kedawung dengan memberikan usaha-usaha yang maksimal seperti pengiriman pakan yang tepat waktu dan tidak telat. Dan juga pengangkutan telur yang teratur setiap minggunya.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Pihak swasta dan pemerintah menjalankan peran sesuai dengan tugas masing-masing. Pemerintah menjalankan fungsi pelayanan guna memudahkan peternak ayam untuk mengembangkan usahanya. Pihak swasta bekerjasama dengan peternak untuk bersama-sama mengembangkan peternakan ayam ras petelur.

c. Kerja sama antara peternak ayam dengan pihak swasta

Peternakan ayam di Desa Kedawung Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar telah berkembang pesat selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka kebutuhan akan jumlah pakan, nutrisi ternak, dan *kuthuk* (anak ayam berusia 1-60 hari), maka pihak swasta yaitu UD. Gemilang menawarkan kerja sama seperti yang diungkapkan oleh ibu Puji Sekretaris UD. Gemilang:

“pada awalnya, kami mengetahui kalau di Desa Kedawung itu mulai berkembang peternakan ayam ras petelur dan kami analisis selama

beberapa tahun, ternyata perkembangan peternakan disana itu semakin baik dari tahun ke tahun. Mulai saat itu kami menawarkan kerja sama dengan masyarakat sana, dan masyarakat memberikan respon yang positif.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Proses kerja sama tersebut berjalan dengan baik, mulai dari beberapa orang peternak saja yang melakukan kerja sama, terus berkembang dan mendapatkan mitra yang banyak, seperti yang dikatakan Ibu Puji selaku sekretaris UD. Gemilang:

“ya awalnya cuma ada beberapa orang saja yang melakukan kerja sama dengan kami, dan pada saat mulai kerja sama juga peternak di Desa Kedawung belum sebanyak sekarang. Dari tahun ke tahun jumlah peternak semakin banyak, begitu juga mitra kami dari tahun ke tahun juga semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan banyak peternak baru yang melihat keuntungan dari bekerjasama dengan kami, makanya peternak baru juga mengikuti jejak peternak yang sudah senior.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Bapak Imam Makhfud selaku kepala UD. Gemilang juga menambahkan bahwa:

“pertama kenapa saya memilih Desa Kedawung untuk saya ajak kerja sama karena perkembangan peternakannya bagus mbak. Itu bisa dilihat dari jumlah peternak yang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat dan juga potensi peternakan kedepannya saya rasa akan semakin maju lagi untuk kedepannya. Kedua karena letak geografisnya yang tidak sulit untuk ditempuh kami dalam mendistribusikan pakan ternak dan mengambil talur hasil produksi. Masyarakat Desa Kedawung ternyata menyambut baik kerja sama yang saya dan tim tawarkan ke mereka. Memang awalnya butuh proses dalam membuat masyarakat percaya untuk bekerjasama dengan kami, namun masyarakat cukup antusias dalam menyambut kerja sama ini. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah total mitra kami 131 orang sebanyak 80% itu berada di Desa Kedawung, 10% di Desa Summersari, dan 10% di Desa Ngoran.”(wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sunarto peternak ayam Desa Kedawung:

“pertama kali saya kenapa kok tertarik bekerjasama dengan UD. Gemilang, karena sudah banyak yang melakukan itu salah satunya. Dan

saya lihat juga proses kerjasamanya itu saling menguntungkan satu sama lain, juga mempermudah kita sebagai peternak dalam mendapatkan pakan ayam, itu yang menjadi pertimbangan saya. Faktor lingkungan juga mempengaruhi karena sebian besar saudara saya kan juga peternak, jadi ya saya mengikuti jejak mereka.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Hal tersebut juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Santoso, mengungkapkan bahwa:

“banyak faktor mbak yang membuat saya kerja sama dengan UD. Gemilang, yaitu pertama karena lingkungan saya semua peternak yang kebanyakan juga mitra dengan UD. Gemilang. Kedua banyak kemudahan yang peternak dapatkan apabila kerja sama dengan UD. Gemilang salah satunya yaitu kami secara rutin mendapatkan pakan ayam yang didistribusikan saru minggu sekali dan juga telur hasil produksi yang juga rutin diambil satu minggu sekali tidak melihat rendah atau tingginya harga telur. Jadi telur tetap akan dipasarkan.” (wawancara tanggal 5 Mei 2018)

Kerja sama yang dilakukan antara pihak UD. Gemilang dan peternak ayam di Desa Kedawung melalui beberapa proses, seperti yang dikatakan oleh Ibu Puji selaku sekretaris UD. Gemilang bahwa:

“kerja sama yang kami lakukan cukup mudah, yaitu awalnya hanya memberitahukan berapa jumlah ayam yang dipelihara, dan memberikan berupa uang tunai sebagai jaminan untuk melakukan kerja sama, dan menjadi awal supaya kami bisa memasok kebutuhan pakan ayam. tidak ada perjanjian yang ditanda tangani oleh kami sebagai mitra dalam proses kerja sama, jadi kami hanya menggunakan sistem kepercayaan saja.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nikmah peternak ayam peterlur bahwa:

“kami jika akan melakukan kerja sama dengan UD. Gemilang harus mempunyai jaminan dulu, membayar beberapa uang tunai untuk jaminan dan juga kami juga harus sudah punya ternak ayam yang sudah siap betelur. Tidak ada perjanjian tertulis diantara peternak dan UD. Gemilang, yang ada ya hanya itu membayar dan UD. Gemilang langsung memasok kebutuhan pakan yang kami butuhkan dan juga UD sudah dapat mengambil telur hasil produksi dari peternak.” (wawancara tanggal 30 April 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam ras petelur, menyatakan bahwa:

“perjanjian kerja sama yang kami lakukan ya hanya sebatas saling percaya itu mbak, tidak ada perjanjian yang ditulis di dokumen dan ditanda tangani seperti itu tidak ada. Hanya diawal memang harus membayar uang sejumlah yang sudah ditentukan sebagai jaminan bahwa kerja sama sudah disepakati kedua belah pihak, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Para peternak awalnya harus mandiri terlebih dahulu dalam memulai usaha ternaknya. Semua keperluan mulai dari pembuatan kandang ayam untuk *kuthuk* (anak ayam usia 1-60 hari), ayam dewasa yang siap produksi telur, gudang tempat pakan ayam dan telur, pakan ayam dan semua nutrisi yang diperlukan ayam. Setelah peternak tersebut mempersiapkan semuanya dan ayam ternak sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan siap untuk betelur, maka proses kerja sama dengan pihak swasta. Ibu Fitriani peternak ayam mengungkapkan ada beberapa kesepakatan di dalam kerja sama dengan pihak UD. Gemilang tersebut yang harus dipenuhi:

“kami melakukan kerja sama dengan cara tukar-menukar barang hasil produksi, yaitu peternak menyetorkan telur hasil produksinya yang akan diambil oleh pihak UD. Gemilang selama satu minggu sekali, dan juga UD. Gemilang mendistribusikan pakan ayam yang diperlukan oleh peternak selama satu minggu sekali. Pakan ayam yang kami distribusikan antara lain katul, jagung, dan consentrat. Consentrat itu ada beberapa jenis mbak, yaitu ada TOP 36, comfeet, dan cargil” (wawancara tanggal 30 April 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam ras petelur, bahwa:

“proses kerja sama yang kami lakukan yaitu setiap minggunya kami dijatah pakan sesuai dengan pakan yang kami butuhkan, jadi setiap peternak berbeda-beda jumlah pakan ayamnya. Selanjutnya kami peternak berkewajiban menyetorkan hasil telur yang kami produksi ke UD.

Gemilang sebagai pembayaran atas pakan ayam yang kami dapatkan. jadi setiap minggunya rutin seperti itu.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)



Gambar 8 Proses Pendistribusian Pakan Ayam

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 9 Proses Pengambilan Telur dari Peternak

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Hal tersebut dilaksanakan secara terus menerus selama proses kerja sama berlangsung. Kerja sama UD. Gemilang juga melakukan kerja sama dengan daerah lain tetapi perkembangan produksi telurnya tidak sebgus di Desa Kedawung. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Puji selaku sekretaris UD. Gemilang:

“Kami mendistribusikan telur itu setiap hari ke daerah Jakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan telur tersebut kami juga bekerjasama dengan daerah lain bukan hanya dengan Desa Kedawung saja. Tetapi perkembangan peternakan dan

produksi telur daerah lain itu tidak sebaik Desa Kedawung. Jika dipresentasikan sebanyak 80% kami bekerjasama dengan Desa Kedawung dan 20% dengan daerah lain.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Di Desa Kedawung memang sebagian besar penduduknya berprofesi dibidang peternakan dan perkebunan. Hampir 80% penduduknya beternak dan berkebun. Peternakan yang dilakukan bukan hanya ayam ras petelur, tetapi juga sapi perah, sapi potong, kambing, burung puyuh, ayam potong walaupun komoditasnya tidak sebanyak ayam ras petelur. Perkebunan juga menjadi salah satu pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat Desa Kedawung, umumnya masyarakat menanam tebu, singkong, jagung, dan nanas. Seiring dengan semakin berkembangnya peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung banyak yang beralih menjadi peternak ayam ras petelur. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitriani peternak ayam yaitu:

“kalau ditanya kenapa saya memilih menjadi peternak, ya karena memang lingkungan saya peternak semua. Menjadi semacam motivasi untuk mengikuti beternak juga, dan dilihat-lihat juga bisa menguntungkan dan dapat berkembang dengan baik walaupun modal awal yang digunakan memang cukup besar.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Ibu Sulikah peternak ayam juga mengatakan hal demikian, Bapak Mahmudi mengungkapkan bahwa:

“saya menjadi peternak juga awalnya karena orangtua peternak dan hampir semua keluarga saya peternak, jadi saya mengikuti jejak mereka untuk beternak ayam. Selain itu juga saya melihat kerja sama dengan UD. Gemilang ini memberikan keuntungan bagi peternak sehingga perkembangan peternakan di Desa Kedawung baik.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Disetiap kerja sama yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain harus saling menguntungkan. Walaupun tidak terlepas dari kerugian yang dialami harus tetap ditanggung bersama. Keuntungan peternak yang didapatkan

dari kerja sama dengan pihak UD. Gemilang yaitu diungkapkan oleh Ibu Nikmah peternak ayam di desa Kedawung:

“keuntungannya soal pakan ayam kami tidak bingung. Jika ada pakan mahal atau langka, kami tetap mendapatkannya sesuai dengan yang kami butuhkan. Pada saat harga telur anjlok, telur ayam kami tetap disetorkan ke pihak UD. Gemilang, tanpa merasa takut tidak akan laku terjual. Tetapi ada juga titik lemah yaitu harga telur ayam kami menjadi dibawah harga pasaran yang semestinya.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Peternak bekerjasama dengan pihak UD. Gemilang mendapatkan jaminan pasokan pakan ayam setiap minggu. Peternak tidak perlu memikirkan akan kekurangan pakan ayam karena sudah dijamin tetap akan mendapatkan pasokan pakan walaupun harga pakan naik terkadang menyebabkan kelangkaan dan susah untuk mencari pakan ayam tersebut. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi peternak yang tidak harus mencari-cari kebutuhan pakan sendiri. Keuntungan lainnya yang didapat adalah pada saat harga telur ayam anjlok, peternak mendapatkan jaminan bahwa telur tersebut tetap akan disetorkan ke pihak UD. Gemilang tanpa merasa takut telur ayam tidak akan laku terjual dipasaran.

Selain mendapatkan keuntungan terjaminnya pasokan pakan ayam dan telur selalu terdistribusi dengan baik. Peternak di Desa Kedawung juga mendapatkan penghasilan yang baik dari telur yang diproduksi. Jika harga telur ayam bagus maka penghasilan peternak juga besar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Santoso sebagai berikut:

“untuk masalah pendapatan yang diperoleh peternak ya mbak, itu beda-beda tergantung jumlah ternaknya masing-masing. Kalau ternaknya 1000 ekor kira-kira mendapatkan penghasilan sekitar 2,5 juta rupiah setiap bulannya. Kalau jumlah ternaknya lebih dari itu ya tinggal menambahkan saja mbak.” (wawancara tanggal 5 Mei 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Fitriani mengungkapkan bahwa:

“peternak itu pendapatannya tidak tentu mbak. Kadang banyak kalau lagi harga telur bagus kadang juga bisa rugi kalau harga telur sedang anjlok. Dan juga setiap peternak itu mempunyai pendapatan yang berbeda-beda tergantung jumlah ternaknya. Kalau saya kan jumlah ternaknya 3000 ekor. Jadi pendapatan saya per bulan itu ada 7,5 juta rupiah per bulan.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018).

Masyarakat Desa Kedawung yang umumnya tidak bermatapencarian sebagai peternak saja, tetapi juga sebagai pekebun. Pendapatan masyarakat yang tadinya tidak menentu, semenjak mulai berkembangnya peternakan menjadikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mahmudi peternak Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

“sebelum saya menjadi peternak pekerjaan saya berkebun dan mejadi sopir truk mbak. Pendapatan saya tidak menentu waktu itu, terkadang hanya mendapatkan Rp. 50.000,- per hari. Itu kalau lagi ada hasil, kalau tidak ada ya tidak menghasilkan apa-apa mbak. Jadi pendapatan per bulannya tidak menentu mbak, karena ya itu tergantung ada kerjaan atau tidak.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Sunarto peternak di Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

”sebagian besar ya mbak di Desa Kedawung ini pekerjaannya berkebun. Karena disini masih luas sekali kebun-kebunnya. Jadi pendapatan sehari-hari kami tidak adanya. Adanya tabungan dari hasil berkebun kami pada saat panen. Jadi pendapatan kami pas panen saja sebelum beternak ini. Semenjak beternak, pendapatan kami lebih sedikit menentu mbak, ada yang kami harapkan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Dibalik kemudahan dan keuntungan yang didapatkan ada juga kelemahan di dalam kerja sama ini yaitu peternak mendapatkan tawaran harga telur dibawah

harga pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunarto peternak ayam ras petelur:

“kelemahan saat kami kerja sama dengan UD. Gemilang itu di penawaran harga telur. Kami mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran. Terkadang juga selisihnya agak banyak, jadi waktu harga telur tinggi terkadang kami menjual telur ke agen lain untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Penawaran dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasaran menyebabkan kerugian bagi peternak. Apalagi waktu harga telur sedang tinggi, sehingga keuntungan yang didapatkan peternak tidak maksimal. Para peternak mensiasati hal tersebut dengan menjual beberapa kilogram telur ayam hasil produksinya kepada agen lain dengan harga yang lebih mahal dibandingkan yang ditawarkan UD. Gemilang. Peternak tetap menyetorkan telur hasil produksinya tetapi dengan jumlah yang berkurang. Hal tersebut menyebabkan kerugian pada pihak UD. Gemilang, seperti yang diutarakan oleh Ibu Puji selaku sekretaris UD Gemilang:

“kalau harga telur ayam lagi rendah itu semua peternak setor *full* telurnya ke kami. Tetapi kalau harga telur sedang tinggi, peternak menjual sebagian telurnya ke agen lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga kami mendapatkan lebih sedikit pasokan telur dari peternak, sedangkan telur yang kami butuhkan semakin banyak karena permintaan konsumen yang semakin tinggi.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Itu salah satu kelemahan yang dialami oleh UD. Gemilang dalam kerja sama dengan peternak ayam. Pada saat harga rendah, UD. Gemilang juga mendapatkan kerugian karena tidak sebanding dengan harga pakan yang semakin melambung. Disatu sisi harga telur rendah dan permintaan konsumen menurun, dan disisi lain harga pakan ternak ayam semakin melambung dengan kebutuhan

pakan yang semakin banyak. Tidak jarang juga pihak UD. Gemilang dengan kondisi yang demikian bisa sampai minus keuangannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imam Mahfud kepala UD. Gemilang, bahwa:

“kalau harga telur lagi anjlok itu yang susah mbak. Kami harus terus bisa memutar uang untuk tetap memenuhi kebutuhan pakan bagi para peternak, sedangkan keuntungan yang didapatkan tidak dapat untuk menambal kekurangan uang untuk membeli pakan. Apalagi kalau harga pakan terus naik.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Puji sekretaris UD Gemilang bahwa:

“terkadang kalau harga telur rendah tetapi harga pakan semakin melambung, keuangan kami bisa sampai minus. Karena kami harus terus memasok pakan ayam untuk peternak, sedangkan harga telur tidak sebanding dengan harga pakan yang kami berikan. Ada beberapa mitra kami yang keuangannya sampai minus banyak sekali. Untuk membantu keuangan supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pakan ayam bagi peternak, yang pertama kami lakukan adalah memberikan surat yang berisi permohonan bantuan keuangan. Pemberian surat permohonan bantuan tersebut menandakan bahwa minus keuangan peternak tersebut masih bisa ditoleransi, sehingga kerja sama masih bisa dilakukan. Pernah ada peternak mitra kami yang sampai sangat minus sekali keuangannya dan akhirnya memutuskan kerja sama dengan peternak tersebut membayar minus keuangannya kepada kami dan kami tidak lagi mendistribusikan pakan ternak lagi ke peternak tersebut.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Peternak yang mendapatkan surat dari UD. Gemilang adalah peternak yang keuangannya minus. Maksudnya, telur yang peternak setorkan ke pihak UD. Gemilang tidak sebanding dengan pakan ayam yang dibutuhkan, sehingga keuangan peternak tersebut menjadi minus. Jadi peternak harus membayar kekurangan uang supaya pihak UD. Gemilang tetap bisa memasok pakan ayam kepada peternak tersebut.

2. Kendala yang dihadapi dan cara untuk mengatasi kendala dalam proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

a. Modal

Suatu kegiatan usaha yang menduduki posisi penting adalah permodalan. Permodalan menjadi salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu usaha tidak terkecuali dengan usaha peternakan ayam ras petelur. Tanpa dukungan modal yang cukup, maka peternakan ayam ras petelur bisa berjalan dengan lambat atau bisa juga sama sekali tidak berkembang. Maka dari itu modal sangat penting guna menunjang berkembangnya peternak ayam ras petelur di Desa Kedawung.

Masyarakat Desa Kedawung mengalami masalah permodalan, karena memang untuk berwirausaha sebagai peternak ayam ras petelur memerlukan modal yang cukup besar. Banyak kebutuhan awal yang harus disiapkan untuk memulai usaha. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitriani peternak ayam menyatakan bahwa:

“modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha peternakan ini cukup besar, karena banyak yang harus dipersiapkan seperti *kuthuk* (anak ayam usia 1-60 hari), kandang, gudang tempat pakan ayam dan telur. Semua yang dibutuhkan tersebut membutuhkan dana yang besar. Sekarang kita bicara tentang awal mula mau beternak ya, jadi kita harus membangun gudang tempat pakan dan telur, kandang ayam, pakan ayam serta *kuthuk*. Dana yang kita butuhkan untuk sampai ayam siap produksi telur itu yaitu kurang lebih 50 juta rupiah.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Kemudian pernyataan dari Bapak Budi Jatmiko selaku Kepala Desa Kedawung terkait dengan permodalan seperti berikut ini:

“kalau soal permodalan, jujur kami pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak. Modal yang dibutuhkan untuk usaha peternakan terbilang cukup besar. Sedangkan kami sebagai pemerintah tidak bisa mengeluarkan atau meminjamkan uang dalam jumlah besar untuk modal usaha. Jadi peternak harus mandiri dalam mencari sumber dana untuk mengembangkan usaha peternakannya.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Walaupun tidak bisa berbuat banyak, pemerintah desa tetap mengupayakan agar peternakan di Desa Kedawung tetap dapat berkembang dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa yaitu memberikan kemudahan perijinan (surat-surat) yang dibutuhkan untuk peternak melakukan peminjaman modal kepada pihak Bank. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Budi Jatmiko Kepala Desa Kedawung bahwa:

“kami tidak bisa memberikan bantuan langsung dalam bentuk modal kepada masyarakat. Tetapi kami bisa memberikan kemudahan pelayanan dalam bentuk surat-surat dari desa yang diperlukan untuk peminjaman modal kepada pihak Bank.” (wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Santoso peternak ayam, mengungkapkan bahwa:

“iya kami mandiri mbak dalam mencari modal untuk usaha kami. Ada yang memang sedikit-sedikit punya uang sendiri dan memulai usahanya dari bawah dengan modal yang seadanya. Banyak juga peternak yang memang berani dan mempunyai cukup jaminan untuk pinjam ke pihak bank, sehingga mendapatkan dana segar untuk mengembangkan usahanya. Nah untuk pinjam uang itu kami butuh surat keterangan dari desa mbak. Alhamdulillah sekali pihak desa sangat membantu kami dalam hal tersebut.” (wawancara tanggal 5 Mei 2018)

Modal yang dibutuhkan dalam beternak ayam ras petelur ini bisa terbilang cukup besar. Pemerintah desa tidak dapat membantu dalam bentuk materi berupa modal langsung kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagai pihak yang melayani masyarakat memberikan kemudahan dalam perijinan (surat-surat) yang dibutuhkan untuk peminjaman modal kepada pihak Bank atau

pihak lainnya. Pemerintah desa mendukung sepenuhnya kegiatan masyarakat yang sifatnya membawa perkembangan yang baik bagi usaha peternakan di Desa Kedawung.

b. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan pelaksana dari suatu kegiatan, manusia yang mampu berkembang dan menyesuaikan keadaan dengan memunculkan inovasi-inovasi yang menarik akan menang melawan perkembangan jaman. Tak terkecuali masyarakat Desa Kedawung. Kemampuan sumber daya manusia memang sangat penting untuk kemajuan suatu usaha atau kegiatan. Begitu juga dengan masyarakat Desa Kedawung, kebutuhan akan pengetahuan dan *skill* mengenai bagaimana cara merawat ternak ayam ras petelur sangat diperlukan, karena cukup rumit dan banyak komponen yang diperlukan dalam perawatan ternak ayam ras petelur. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam bahwa:

“sebagai peternak ayam itu harus punya pengetahuan yang lebih mengenai cara merawat ternak ayam yang baik dan benar. Soalnya ayam ras petelur itu gampang rewel dan sakit, dan juga perawatannya agak detail dan banyak komponen yang harus dilakukan untuk merawat ternak ayam. apalagi disini kan kandang ayamnya sistem terbuka mbak, jadi rentan sekali dengan berbagai penyakit.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Peternak awan biasanya meminta bantuan kepada peternak yang lebih senior untuk diajari bagaimana cara merawat ternak ayam ras petelur dengan baik dan benar. Pelatihan yang dilakukan hanya sebatas pemberitahuan dari peternak satu ke peternak lainnya. Pemerintah desa tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai bagaimana cara beternak ayam yang baik dan benar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Fitriani peternak ayam bahwa:

“kami sebagai peternak mencari tahu sendiri bagaimana cara beternak ayam ras petelur yang baik dan benar. Waktu masih awal sekali beternak saya minta bantuan kepada orangtua dan saudara saya yang sudah lebih dulu beternak, setelah beberapa saat saya bisa melakukan sendiri.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Pengetahuan dan *skill* yang dimiliki peternak ayam ras petelur di Desa Kedawung bisa dibilang masih minim. Tanpa adanya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, peternak berusaha untuk mencari pengetahuan sendiri dan berusaha untuk melakukan cara beternak yang baik dan benar. Hal tersebut menyebabkan cara beternak mereka yang minim dan seadanya saja. Bahkan untuk jenis vaksin tertentu yang harus diberikan untuk ayam, hanya ada beberapa orang saja yang bisa dan mempunyai alat untuk memberikan vaksin tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam:

“dalam perawatan ayam ternak vaksin harus diberikan tepat sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kalau tidak bisa berdampak buruk bagi kesehatan ayam. Kalau vaksinya biasa saya bisa memberikan sendiri, tetapi ada vaksin yang harus menggunakan alat untuk disuntikkan ke ayamnya. Jadi saya harus meminta bantuan kepada orang yang bisa dan mempunyai alat tersebut, cuma ada beberapa orang yang bisa dan punya alatnya disini.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Masyarakat desa yang pada umumnya kurang dalam ilmu pengetahuan dan informasi melakukan beternak ayam secara otodidak tanpa didampingi langsung oleh pemerintah setempat. Mencari informasi sendiri dari pihak lain dan bekerjasama untuk mengembangkan usahanya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang minim serta kurangnya pendampingan dari pemerintah, sangat riskan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi usahanya.

Permasalahan yang dialami masyarakat terbantu dengan adanya kelompok ternak “Unggas Jaya” yang menjadi wadah bagi peternak untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunarto peternak ayam, menyatakan bahwa:

“peternak di Desa Kedawung ini memang mayoritas bisa-bisa an mbak. Bisa karena terbiasa melakukannya, jadi mau tidak mau harus bisa karena itu yang dilakukannya setiap harinya. Ternak ayam itu agak ribet memangan mbak, ayam ras petelur itu gampang rewel, jadi kami peternak harus intens dalam merawatnya, dan tidak boleh sampai telat obat atau vaksinnnya. Nah alhamdulillah sekali, di Desa Kedawung ini ada kelompok ternak “Unggas Jaya” yang sangat membantu kami dalam mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang peternakan. Jadi informasi kami selalu terupdate setiap bulannya.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng ketua kelompok ternak “Unggas Jaya” dan juga peternak di Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

”kelompok ternak “Unggas Jaya” sudah agak lama berdiri mbak, dari tahun 2008, tahun-tahun awal mulai berkembangnya peternak di desa ini. Awalnya anggota kami hanya 15 peternak, terus berkembang-berkembang sampai tahun 2015 itu anggota kelompok ternak ada 115 peternak. Setelah itu ada krisis yang melanda peternak karena harga telur yang anjlok sehingga peternak rugi karena tidak dapat mengganti biaya produksi. Oleh karena itu ada banyak peternak yang gulung tikar sebanyak 31 peternak, sehingga sampai maret 2018 ini jumlah peternak di Desa Kedawung berjumlah 84 peternak. Dengan 84 peternak tersebut kami masih aktif melakukan berbagai kegiatan. Kami melakukan pertemuan selama satu bulan sekali dengan melakukan berbagai agenda. Yang pertama kami melakukan kegiatan yang sering kita sebut arisan, selanjutnya agenda mendengarkan keluhan yang dialami oleh peternak, dan ada juga sosialisasi dari berbagai pihak. Ada tiga sektor yang pernah melakukan sosialisasi yaitu Perbankan, Perusahaan Obat-Obatan dan Vaksin, dan juga dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh kelompok peternak “Unggas Jaya” tersebut ditujukan bagi peternak untuk menambah pengetahuan

dan skill dalam peternakan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh

Bapak Santoso, menyatakan bahwa:

“saya sudah agak lama mbak ikut kelompok ternak “Unggas Jaya” ini, bisa dibilang sejak awal saya mulai beternak saya ikut kelompok ternak ini. Dengan ikut kegiatan kelompok ternak “Unggas Jaya” ini sangat membantu saya dalam merawat ternak saya. Saya bisa *sharing* mengenai kendala yang saya alami, dan juga mendapatkan informasi yang saya butuhkan, seperti obat-obatan ternak, cara vaksin yang benar dan masih banyak lagi.” (wawancara tanggal 5 Mei 2018)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mahmudi, menyatakan bahwa:

“dengan mengikuti kegiatan di kelompok ternak ini kami jadi lebih banyak tahu dan kemampuan kami dalam beternak juga bertambah. Hal tersebut mempengaruhi produksi telur yang dihasilkan ternak menjadi lebih baik, kami juga dapat mengantisipasi penyakit yang menyerang ternak sehingga tidak sampai terserang penyakit, dan juga kami mendapatkan informasi mengenai perkembangan peternakan modern dan potensi peternakan di masa yang akan datang.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

c. Lahan

Lahan merupakan salah satu komponen utama yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha peternakan ayam ras petelur. Ukuran kandang yang besar menyebabkan kebutuhan lahan pun juga besar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Fitriani peternak ayam bahwa:

“ukuran kandang yang dibutuhkan untuk beternak itu besar, kurang lebih untuk ayam yang berjumlah 500-1000 ekor membutuhkan kandang yang berukuran 50 m², semakin besar lahan yang kami punya, akan semakin banyak juga ternak, jadi untuk mengembangkan peternakan, kami membutuhkan lahan yang besar.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Hal tersebut juga dibenarkan okeh Bapak Mahmudi peternak ayam, menyatakan bahwa:

“memang usaha peternakan itu tidak mudah mbak. Banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi sebagai peternak. Salah satunya yaitu lahan.

Untuk mengembangkan peternakan yang besar, kami juga membutuhkan lahan yang besar juga. Enak mbak kalau orang tersebut punya kebun atau lahan yang luas, jadi tidak perlu bingung untuk mengembangkan usahanya, beda sama yang kurang lahan mbak, agak susah mengembangkan usaha karena hanya punya lahan yang kecil jadi jumlah ternaknya juga kecil. Dan kebanyakan di Desa Kedawung ini adalah peternak rakyat, jadi kebanyakan mempunyai ternak dibawah 10.000 ternak.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Lahan menjadi salah satu prioritas utama dalam peternakan ayam ras petelur. Salah satu kendala yang menyebabkan sulit berkembangnya usaha peternak ayam kecil adalah masalah lahan yang sempit. Lahan yang sempit menyebabkan peternak tidak dapat berkembang dengan baik. Peternak harus memanfaatkan lahan seadanya demi berlangsungnya usaha mereka. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sulikah peternak ayam, bahwa:

“kalau peternak kecil seperti saya ya lahannya seadanya saja mbak. Kalau kandang ayamnya sudah penuh semua, kami menunggu sampai ada ayam yang sudah tua dan tidak betelur lagi, baru ayam itu kami jual dan digantikan lagi dengan ayam yang siap bertelur. Hal tersebut mempengaruhi produksi telur yang kami setorkan ke UD. Gemilang, karena kami tidak dapat dengan cepat mengganti kekosongan kandang akibat ayam yang sudah tidak betelur, kami membutuhkan waktu yang cukup lama sampai ayam yang baru dapat betelur kembali. Sehingga telur yang kami setorkan menurun.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Untuk mensiasati lahan yang sempit, peternak harus melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu yang dapat dilakukan oleh peternak yaitu secara berkala terus mengisi kandang ayamnya. Ayam yang sudah memasuki masa tua dan sudah tidak bertelur lagi, akan diganti dengan ayam yang muda dan sudah siap bertelur. Ayam yang sudah tua tersebut dijual kepada distributor ayam pedaging untuk dijual ke pasaran. Ibu Fitriani mengungkapkan bahwa:

“peternak ayam ras petelur di desa sebagian besar pakai kandang baterai seperti ini. Kandang baterai sangat sederhana dan tidak memakan banyak tempat, karena satu kotak itu bisa diisi dua ayam mbak jadi lebih banyak

ayam yang dapat dimasukkan ke dalam satu kandang.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Mahmudi peternak ayam ras petelur, bahwa:

“salah satu yang membuat kita bisa menghemat lahan itu ya pakai kandang baterai mbak. Kandang baterai itu bisa muat banyak ayam, satu kotak saja bisa berisi dua ayam dewasa. Dan satu sisi bisa ditumpuk 3 baterai mbak, dalam satu kandang, kita punya dua sisi.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)



Gambar 10 Kandang Baterai
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kandang baterai yang digunakan oleh peternak ayam ras petelur di Desa Kedawung sangat membantu dalam penghematan lahan. Kandang baterai yang berukuran 50 m² dapat menampung sebanyak 500 ekor ayam. kandang tersebut juga dapat digunakan berulang kali.

Selain kandang baterai yang dapat membantu penghematan lahan, Ibu Fitriani mengungkapkan hal lain yang dapat membantu penghematan lahan:

“kami membuat gudang yang banyak kegunaannya mbak. Dalam satu gudang dapat memuat berbagai hal kebutuhan, yaitu pakan ayam, telur ayam, dan terkadang kalau kami memelihara *kuthuk* (anak ayam usia 1-40 hari) juga bisa dipelihara di dalam gudang tersebut.” (wawancara tanggal 1 mei 2018)

Hal tersebut juga sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulikah peternak ayam, bahwa:

“gudang tempat pakan juga dapat digunakan untuk hal lain. Bisa digunakan untuk menyimpan telur hasil ternak, memelihara khutuk dan juga bisa digunakan untuk mencampur pakan ternak. Sehingga dalam satu tempat kami dapat memanfaatkannya untuk berbagai hal.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)



Gambar 11 Gudang
Sumber: Dokumentasi Peneliti

d. Perencanaan Usaha

Perencanaan usaha adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu usaha ke depan meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Kebutuhan akan sebuah perencanaan usaha menjadi mutlak jika akan menjalankan suatu bisnis, karena perencanaan bisnis sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Sebuah perencanaan kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan *cash flow*.

Tetapi pada kenyataannya tidak adanya perencanaan bisnis sama sekali pada masyarakat Desa Kedawung, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitriani peternak ayam bahwa:

“awalnya saya mendirikan usaha karena melihat cukup baik perkembangan peternakan di Desa Kedawung. Kemudian saya mencari modal untuk memulainya, setelah itu saya memulai usaha saya begitu saja, tanpa adanya perencanaan akan seperti apa usaha saya kedepannya.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Hal tersebut sama seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam, bahwa:

“iya tidak ada perencanaan apa-apa mbak, engga ngerti soalnya yang begitu-begitu itu. Orang desa seperti saya ini taunya ya cuma kerja aja setiap hari. Pokoknya yang lurus-lurus saja. Kalau harga telur lagi bagus Alhamdulillah, kalau lagi buruk ya kami peternak kecil ini cari cara buat tidak punya hutang ke pihak UD.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Masyarakat melakukan usaha peternakan ayam kebanyakan karena lingkungan mereka banyak melakukan hal yang serupa dan terlihat menggiurkan. Itu menjadi salah satu kelemahan dalam berwirausaha karena tidak adanya skala kefokusannya dalam menjalankan usaha dan hanya menjalankannya saja. Peternak hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa memikirkan perencanaan kedepan yang lebih matang. Hal tersebut dapat menyebabkan usaha yang mereka lakukan tidak berkembang dengan baik, dan hanya stuck begitu-begitu saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam, bahwa:

“selama tujuh tahun saya melakukan usaha ini, saya merasa ya cuma begini-begini saja usaha saya. Kalau harga telur sedang bagus saya bisa untung dan kalau harga telur jelek saya bisa rugi sekali.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Hal tersebut juga dialami peternak lain yaitu Ibu Sulikah menyatakan bahwa:

“saya bersama suami menjalankan usaha sudah lumayan lama, dulu awalnya karena orangtua melakukan usaha ini dan saya juga mengikuti. Tanpa perencanaan usaha apa-apa diawal saya langsung saja memulai usaha dan sekarang kami kesulitan dalam pengembangan usaha kami.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Masyarakat awam yang sangat-sangat minim pembinaan dan pengawasan dari pemerintah mengenai bagaimana cara memulai usaha dengan baik sangat riskan dengan dengan kegagalan dan tidak berkembangnya usaha. Kurang pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat desa dan kurang beraninya berinisiatif untuk mengembangkan usaha juga menjadi salah satu faktor mengapa usaha tidak berkembang dengan baik. Masyarakat kurang memahami bagaimana kelebihan dan kekurangan beternak ayam ras petelur, jadi jika peternak mengalami kerugian mereka tidak bisa melakukan hal-hal untuk menanggulangnya.

Salah satu kunci sukses melakukan usaha yaitu diawali dengan membuat sebuah perencanaan usaha yang matang dan realistis apapun jenis usaha yang akan dijalankan. Melakukan kerja sama dengan pihak lain juga harus direncanakan dengan matang supaya bisa mengetahui apa peran masing-masing pihak serta mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam menjalankan kerja sama. Perencanaan usaha menjadikan peternak tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak mengikuti alur saja, dan juga peternak dapat merencanakan cara mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani peternak ayam, bahwa:

“tidak ada pencatatan apapun dalam usaha saya. Waktu dulu awal-awal saya memulai usaha, saya sempat mencatat dengan rapi berapa jumlah pakan yang diberikan oleh pihak UD dan berapa jumlah telur yang saya setorkan. Hal tersebut membantu saya dalam melihat selisih uang yang tersisa. Tetapi semakin lama saya tidak pernah mencatat lagi.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Mahmudi peternak ayam ras petelur, bahwa:

“saya tidak pernah mencatat apapun yang saya lakukan, ya hanya melakukannya saja. Saya cuma ada pedoman untuk kapan waktunya memberikan vaksin itu saja. Kalau soal pencatatan keuangan dan agenda-agenda lain tidak pernah, saya tidak tahu soal itu.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Hasil wawancara dengan Ibu Sulikah peternak ayam ras petelur juga demikian, bahwa:

“kalau orang di desa hanya melakukan apa yang ada saja, tidak kepikiran kalau soal perencanaan usaha atau perencanaan apa yang akan dilakukan nantinya. Ya cuma mengikuti alur saja harus gimana. Istilahnya pokoknya ada yang dibuat makan sehari-hari, udah gitu.” (wawancara tanggal 2 Mei 2018)

Masyarakat desa yang sangat minim ilmu pengetahuan dan informasi tidak mengetahui harus membuat perencanaan usaha terlebih dahulu dalam menjalankan usaha. Peternak bahkan tidak melakukan catatan keuangan keluar masuk usaha mereka. Peternak tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan per bulan dalam usahanya. Peternak tidak mengetahui pasti berapa uang yang dikeluarkan untuk beternak ayam selama per bulan. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol keuangan akan usaha yang mereka jalankan.

Perencanaan usaha tetap perlu dibuat walau sangat sederhana. Perencanaan usaha juga tetap penting karena bisa untuk memperkirakan prospek, keuntungan maupun resiko usaha tersebut dan juga merupakan

pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengedaan peralatan.

e. Tidak Stabilitasnya Harga Telur

Harga telur sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan para peternak. Harga telur yang tidak stabil menyebabkan peternak kesulitan dalam pemenuhan biaya produksi. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sugeng Ketua Kelompok Ternak “Unggas Jaya” dan juga peternak di Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

“bagi peternak ayam itu kendala yang paling berat yaitu tidak stabilnya harga telur mbak. Terkadang kalau harga lagi bagus bisa bagus sekali, tetapi kalau harga lagi rendah bisa rendah sekali. Pernah itu tahun 2016-2017, tahun-tahun itu adalah tahun tidak stabilnya harga telur yang terparah. Telur yang kami jual itu tidak dapat memenuhi biaya produksi kami, jadi kami rugi. Sehingga banyak peternak yang saat itu menanggung kerugian yang sangat besar dan akhirnya gulung tikar.” (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Nikmah peternak ayam, menyatakan bahwa:

“keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan itu semua tergantung dengan harga telur yang ada dipasaran mbak. Yang menentukan harga telur kan juga pasaran, jadi ya kami berharap tidak ada oknum-oknum yang mempermainkan harga telur karena itu sangat mempengaruhi keberlangsungan peternakan kami. (wawancara tanggal 30 April 2018)

Harga telur yang baik adalah yang tidak berada di bawah harga produksi yang dikeluarkan oleh peternak, atau paling tidak harga telur sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Sugeng Ketua Kelompok Ternak “Unggas Jaya” dan peternak di Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

“kami sebagai pengusaha ada yang namanya biaya produksi mbak. Nah itu biaya yang kami keluarkan pada saat masa-masa produksi. Itu yang menjadi patokan kami untuk harga telur. Paling tidak, harga minimal yang harus kami peroleh untuk satu kilogram harga telur yaitu sejumlah biaya produksi yang kami keluarkan. Untuk sekarang biaya produksi kami menyentuh angka Rp. 16.000,-. Jadi minimal harga telur yang beredar di pasaran sekarang itu adalah sesuai dengan jumlah biaya produksi tersebut. (wawancara tanggal 10 Mei 2018)

Harga telur ayam juga mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan pakan ayam. Ketidakstabilan harga telur menyebabkan kendala bagi peternak untuk memenuhi harga pakan yang semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Ketua Kelompok Ternak “Unggas Jaya” dan peternak di Desa Kedawung, menyatakan bahwa:

“seperti yang saya ungkapkan diatas tadi mbak. Harga telur sangat mempengaruhi kami dalam memenuhi kebutuhan produksi. Apalagi kebutuhan kami dalam produksi itu banyak, salah satu komponen yang terpenting yaitu pakan. Pakan ayam itu juga ada banyak jenisnya mbak dan harganya itu semakin tahun selalu naik. Itu salah satunya yang menyebabkan banyak peternak gulung tikar jika harga telur tidak stabil. Pakan ayam kan yang memproduksi perusahaan-perusahaan besar kan ya mbak, nah ada permainan harga disitu yang menyebabkan peternak rakyat seperti kami ini yang mendapatkan imbasnya. Kami berharap kepada pemerintah untuk lebih mengawasi dan mengontrol harga telur ayam dan harga pakan dipasaran supaya dapat lebih stabil untuk kedepannya.” (wawancara tanggal 1 Mei 2018)

E. Analisis dan Pembahasan

1. Kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, meliputi:

Setiap kegiatan suatu organisasi yang melibatkan banyak aktor pasti memerlukan suatu kerja sama untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Konsekuensi yang dihasilkan yaitu adanya interaksi terjalinnya suatu hubungan. Hubungan yang terjalin dapat membentuk sebuah ikatan terlepas apakah ikatan tersebut menjadi lemah atau kuat tergantung bagaimana peran setiap *stakeholder* yang terhubungan menjalankannya.

a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan peternak

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah membina kehidupan masyarakat desa dan membina perekonomian desa. Menurut Sutawi (2004:223-225) menjelaskan berbagai peran pelaku kerja yaitu salah satunya pemerintah sebagai peran pembina, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembinaan dan kemampuan kewirausahaan dan manajemen pengusaha/koperasi;

- 2) Membantu penyediaan fasilitas permodalan dengan skim-skim lunak dengan prosedur yang sederhana sehingga mampu diserap dan dimanfaatkan oleh pengusaha;
- 3) Mengadakan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha, khususnya usaha yang dikembangkan dengan kemitraan usaha;
- 4) Melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi banding, dan sebagainya;
- 6) Bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Sutawi (2004) tugas pemerintah desa sebagai pembina salah satunya yaitu bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara pola hubungan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Kedawung dengan peternak ayam adalah pemerintah desa mendukung setiap yang dilakukan oleh peternak ayam, sejauh itu tidak melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pemerintah desa memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan akan surat untuk peminjaman permodalan kepada pihak lain. Pemerintah tidak melakukan banyak

hal untuk membantu peternak ayam dalam mengembangkan usaha peternakannya, karena usaha peternakan dianggap sebagai usaha yang mandiri berbeda dengan pertanian lainnya seperti padi, pemerintah setempat masih mengelola pendistribusian kompos, tetapi untuk peternakan pemerintah setempat tidak melakukan banyak hal.

Menurut Sutawi (2004) tugas pemerintah desa sebagai pembina yaitu salah satunya membantu penyediaan fasilitas permodalan dengan skim-skim lunak dengan prosedur yang sederhana sehingga mampu diserap dan dimanfaatkan oleh pengusaha. Hal tersebut diwujudkan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk surat-surat yang dibutuhkan peternak untuk meminjam modal kepada pihak lain. Karena modal yang dibutuhkan peternak itu cukup besar, sehingga pemerintah desa tidak dapat menyediakan peminjaman permodalan dalam bentuk *fresh money*.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa model kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan peternak ayam adalah model kerja sama yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004:94) yaitu model kerja sama semu. Kerja sama semu yang terjalin antara dua pihak atau lebih, namun dalam kerja sama tersebut keseimbangan antar mitra tidak seimbang, bahkan ada suatu pihak tertentu yang memahami secara benar akan makna sebuah kerja sama yang dilakukan dan untuk tujuan apa kerja sama dilakukan serta disepakati. Dalam kerja sama ini semua pihak yang bekerjasama sama-sama merasa penting untuk melakukan kerja sama, akan tetapi pihak-pihak

yang melakukan kerja sama belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaat yang dihasilkan.

b. Kerja sama antara pemerintah desa dan pihak swasta

Salah satu *stakeholder* yang sangat penting dalam pengembangan peternakan ayam ras petelur adalah pihak swasta yaitu UD.Gemilang. Adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat terjalin untuk keberlanjutan dan kesinambungan pengembangan peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung. Berdasarkan hasil wawancara pola hubungan antara pemerintah dan UD. Gemilang pemerintah bertindak sebagai pengawas terhadap kerja sama yang dilakukan. Menurut Hafzah (2004) dalam Laksono (2017:110), pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. selanjutnya menurut Sutawi (2004:223-225) peran pemerintah sebagai pembina salah satunya yaitu bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada kerja sama langsung yang dilakukan antara pemerintah Desa Kedawung dengan pihak UD. Gemilang. Pemerintah desa mengetahui mengenai kerja sama yang dilakukan oleh UD. Gemilang dengan peternak ayam di Desa Kedawung dan pemerintah mendukung penuh hal tersebut. Pemerintah melakukan fungsinya dalam bentuk pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah desa adalah memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berjalan dengan

baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak saja, pemerintah juga memastikan bahwa lingkungan sekitar juga mendapatkan dampak yang baik.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa model kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan peternak ayam adalah model kerja sama yang dikemukakan oleh Wibisono (2007) bahwa kerja sama yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak swasta UD. Gemilang yaitu pola kerja sama semiproduktif. Kerja sama pola ini pihak swasta tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak tahu mengenai hal-hal yang dikerjakan oleh pihak swasta. Kerja sama lebih mengedepankan aspek karikatis atau *public relation*, dimana pemerintah dan masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Kerja sama ini masih belum strategis, masih mengedepankan kepentingan masing-masing.

c. Kerja sama antara peternak ayam dan pihak swasta

Pihak swasta yaitu UD. Gemilang memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan usaha peternakan di Desa Kedawung. Pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh UD. Gemilang dan peternak ayam di Desa Kedawung sudah terjalin cukup lama. UD. Gemilang dan peternak ayam melakukan kerjasama dengan tukar menukar barang yang dibutuhkan. UD. Gemilang memberikan pakan ayam yang dibutuhkan peternak sedangkan peternak memberikan telur ayam kepada UD. Gemilang untuk didistribusikan.

Kerja sama sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara UD. Gemilang dan peternak ayam sudah terbangun dengan baik.

Berbagai kerja sama yang sudah dibentuk sejak lama dimana kerja sama dibangun berdasarkan kesamaan tujuan dan terdapatnya faktor ketergantungan diantara aktor. Kerja sama yang terjalin antara UD. Gemilang dan peternak ayam di Desa Kedawung terjalin secara efektif karena memiliki tujuan yang sama. Kerja sama tidak akan berjalan efektif dan efisien apabila tidak ada saling ketergantungan yang menguntungkan diantara unsur-unsur yang bekerjasama.

Adanya komunikasi yang bagus antara UD. Gemilang dan peternak ayam juga turut menjaga hubungan kerja sama dan mengefektifkan kerja sama. Komunikasi mencakup transfer informasi dan cara penyampaian informasi kepada *stakeholder*. Menurut Handayani (1989) dalam Laksono (2017:119), koordinasi dalam proses dapat diukur melalui indikator komunikasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan. Mekanisme koordinasi antara *stakeholder* penting untuk menyamakan persepsi dan tujuan pengembangan peternakan ayam ras petelur. Koordinasi sangatlah penting karena didalamnya terdapat banyak kegiatan yang berlainan yang dilakukan oleh banyak orang dalam berbagai bagian. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggungjawab diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai.

Menurut Sutawi (2004:223-225) salah satu peran pihak swasta dalam proses kerja sama yaitu menyusun rencana usaha dengan pengusaha kecil/koperasi mitranya untuk disepakati bersama dan peran peternak ayam dalam kerja sama yaitu bersama-sama dengan pengusaha besar mitranya

melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati. Hal tersebut juga dilakukan oleh kerja sama antara pihak swasta UD. Gemilang dengan pihak peternak ayam ras petelur di Desa Kedawung. Sebelum melakukan kerja sama, ada perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mengenai hak dan kewajiban dalam kerja sama. Sebelum melakukan kerja sama, pihak peternak berkewajiban untuk membayar uang muka sebagai jaminan bahwa kerja sama dimulai. Pihak UD. Gemilang berkewajiban untuk memasok kebutuhan pakan ayam peternak sesuai dengan kebutuhannya dan pihak UD. Gemilang mempunyai hak untuk mendapatkan pasokan telur ayam hasil produksi peternak untuk didistribusikan ke pasaran. Begitu juga dengan kewajiban peternak yaitu menyetorkan hasil produksi telur ayamnya untuk didistribusikan ke pasaran dan hak peternak yaitu mendapatkan pasokan pakan ayam sesuai kebutuhan.

Menurut Sutawi (2004:223-225) salah satu peran pihak swasta dalam kerja sama yaitu memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama yang disepakati. UD. Gemilang merupakan aktor penting dalam pengembangan peternakan di Desa Kedawung. Berdasarkan hasil wawancara, UD. Gemilang sangat membantu peternak dalam hal mendapatkan pakan. Setiap minggunya peternak mendapatkan pakan yang dibutuhkan. Walaupun pada saat pakan sedang mahal atau langka pihak UD. Gemilang tetap berusaha untuk mendapatkan pakan yang dibutuhkan oleh para peternak.

Menurut Sutawi (2004:223-225) salah satu peran pihak swasta dalam kerja sama yaitu bertindak sebagai penyanggah dana atau penjamin kredit untuk

permodalan pengusaha kecil/koperasi mitranya. Dalam proses kerja sama antara UD. Gemilang dengan peternak ayam di Desa Kedawung, pihak UD. Gemilang tidak memberikan langsung peminjaman dalam bentuk modal atau uang tetapi lebih kepada peminjaman dalam bentuk barang. Dari hasil wawancara dan observasi kebanyakan dari peternak melakukan peminjaman dalam bentuk *kuthuk* (anak ayam usia 1-40 hari). Peminjaman tersebut dikarenakan kekurangan modal dari peternak, sehingga dibayar dengan menggunakan telur ayam yang disetorkan kepada pihak UD. Gemilang.

Menurut Sutawi (2004:223-225) salah satu peran pihak swasta dalam kerja sama yaitu menjamin pembelian hasil produksi pengusaha kecil/koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sesuai kesepakatan awal perjanjian kerja sama antara pihak UD. Gemilang dengan peternak ayam Desa Kedawung bahwa peternak wajib menyetorkan telur hasil produksinya dan pihak UD. Gemilang berhak untuk mendapatkan setoran telur hasil produksi untuk didistribusikan. Hal tersebut tidak ada pengecualian pada saat harga telur sedang bagus ataupun harga telur sedang anjlok di pasaran pihak UD. Gemilang tetap menerima semua telur yang disetorkan dan didistribusikan ke pasaran.

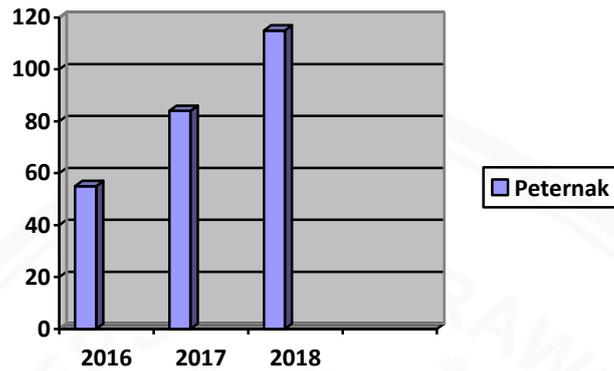
Menurut Sutawi (2004:223-225) salah satu peran pihak swasta dalam kerja sama yaitu promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik. Pihak UD. Gemilang menjamin semua hasil produksi telur baik pada saat harga tinggi maupun rendah akan diterima. Hal tersebut dikarenakan dari hasil wawancara bahwa pihak UD. Gemilang telah mendapatkan pasar yang tetap untuk pendistribusian telur tersebut, sehingga tidak khawatir tidak akan terjual

telur ayam tersebut jika harga sedang murah di pasaran. Pihak UD. Gemilang mendistribusikan telur ayam tersebut ke berbagai kota di Indonesia yaitu Jakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu.

Dalam suatu kerja sama UD. Gemilang dan peternak ayam terdapat karakteristik mengenai apa yang terdapat dalam kerja sama. Menurut Peters (1997) dalam Laksono (2017:120) karakteristik dari pola kerja sama melibatkan dua pihak atau lebih dimana salah satunya adalah pihak swasta (pegsaha), kerja sama tersebut meliputi hubungan kerja sama jangka panjang antar pihak dengan berinteraksi secara terus-menerus. Setiap *stakeholder* memberikan peran secara material maupun non-material sehingga mendapatkan tanggung jawab masing-masing terhadap peran yang dilaksanakan. Karakteristik antara UD. Gemilang dan peternak ayam memenuhi unsur kerja sama karena terdapat interaksi antar pihak, peran, dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*. Sinergitas antara UD. Gemilang dan peternak ayam perlu dibangun kuat supaya kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Hubungan kerja sama yang terjalin antara UD. Gemilang dan peternak ayam diharapkan dapat memberikan stimulan guna perkembangan peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung menjadi lebih baik lagi.

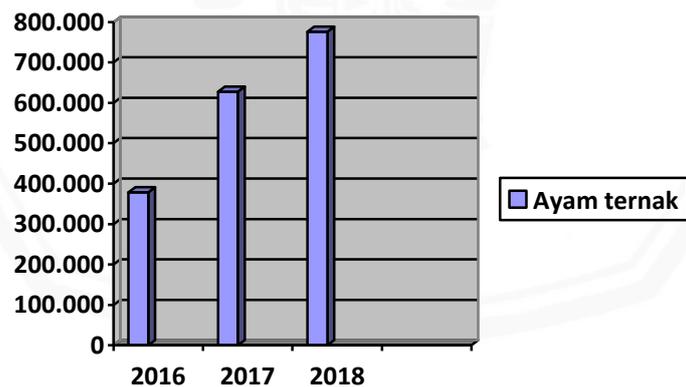
Kerja sama yang dilakukan antara peternak Desa Kedawung dan juga pihak UD. Gemilang menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan perkembangan peternakan di Desa Kedawung menunjukkan angka yang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah peternak di Desa Kedawung menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu

tiga tahun terakhir jumlah peternak dan juga jumlah ayam ternak meningkat dengan sangat baik, ditunjukkan oleh gambar berikut ini:



Gambar 12 Perkembangan Peternak

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 13 Perkembangan Ayam Ternak

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Perkembangan jumlah peternak dan ayam ternak juga berpengaruh terhadap kesejahteraan peternaknya. Dari hasil wawancara dan observasi yang

peneliti lakukan, setelah peternakan mulai berkembang di Desa Kedawung kesejahteraan masyarakat juga bertambah. Masyarakat yang tadinya penghasilannya tidak menentu karena hanya bermatapencarian sebagai pekebun yang rata-rata hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000'- per hari dan itu pun tidak setiap hari bekerja, tetapi setelah beternak ayam masyarakat mempunyai penghasilan yang cukup baik. Dari rata-rata penghasilan peternak yang dimulai dari 1000 ekor ayam itu bisa menghasilkan minimal satu bulan sebesar Rp. 2.500.000,-. Jadi dalam 6 bulan peternak yang mempunyai jumlah ternak minimal 1000 ekor dapat menghasilkan Rp. 15.000.000,-.

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai kerja sama yang dilakukan oleh peternak ayam ras petelur Desa Kedawung dengan pihak swasta UD. Gemilang dapat disimpulkan bahwa pola kerja sama yang dipakai adalah Pola Subkontrak. Pola subkontrak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah hubungan kerja sama usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pada pola subkontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil. Disisi lain pola subkontrak juga mempunyai manfaat yaitu dalam hal kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau

manajemen, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan, dan pembiayaan.

Hubungan kerja sama yang terjalin antara peternak ayam dan UD. Gemilang juga termasuk dalam model kerja sama mutualistik. Kerja sama ini merupakan hubungan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek penting melakukan kerja sama, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, serta sama-sama memahami tujuan dan makna dari kerja sama yang dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh sehingga memudahkan masing-masing *stakeholder* dalam mewujudkan visi misinya dan juga sekaligus menunjang satu dengan yang lainnya. Pemikiran itu diadopsi dari pola simbiosis mutualisme.

2. Kendala yang dihadapi dan cara untuk mengatasi kendala dalam proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

a. Modal

1) Uraian Kendala

Pengertian modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Usaha peternakan ayam ras petelur membutuhkan modal yang relatif banyak dan keterbatasan modal akan

menghambat perkembangan usaha peternakan. Modal yang dibutuhkan adalah modal asing atau pinjaman yang memiliki makna modal yang diperoleh dari pihak luar, biasanya dalam bentuk pinjaman. Permasalahan modal akan menjadi kelemahan dan hambatan tersendiri bagi perkembangan usaha peternakan.

Upaya untuk menghadapi kelemahan yang dialami oleh peternak ayam di Desa Kedawung dalam keterbatasan modal bisa mengancam perkembangan potensi peternakan, oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dalam hal ini sebagai pembina di dalam *stakeholder* pengembangan potensi peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung. Dari hasil wawancara dan observasi, Pemerintah Desa Kedawung tidak dapat berbuat banyak terhadap kendala keterbatasan modal yang dialami oleh para peternak. Pemerintah Desa Kedawung disini hanya melakukan dukungan yang berupa mempermudah pelayanan perijinan (surat-surat) yang dibutuhkan untuk peminjaman modal kepada pihak lain.

Masyarakat secara mandiri mencari modal untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usahanya. Peternak ada yang sudah mempunyai dana sendiri ada juga yang meminjam dari pihak lain. Peternak mengalami kendala modal, sehingga harus menekan biaya. Dari hasil wawancara dan observasi kendala utama yang dihadapi oleh peternak ayam skala kecil menengah di Desa Kedawung adalah keuangan yang tidak memadai, biaya pakan yang tinggi, harga telur yang tidak stabil, dan biaya obat dan vaksin tinggi, serta investasi lain untuk biaya perawatan kandang dsb yang juga banyak mengeluarkan uang.

2) Cara Mengatasi Kendala

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh peternak ayam ras petelur di Desa Kedawung untuk mengatasi permasalahan permodalan:

- a) Menekan biaya produksi kandang ayam. Untuk menekan biaya yang begitu besar, peternak harus pintar-pintar dalam menekan biaya produksi salah satunya yaitu dalam pembuatan kandang ayam. Kandang ayam petelur yang dipakai oleh para peternak adalah kandang baterai. Konstruksi dari kandang baterai dapat terbuat dari kawat atau bambu. Dari hasil wawancara dan observasi kandang yang dipakai oleh peternak ayam di Desa Kedawung menggunakan kandang baterai yang terbuat dari bambu, hal tersebut dapat menekan biaya karena harga kandang baterai bambu lebih murah daripada kandang baterai kawat. Walaupun dalam penggunaannya kandang baterai bambu tidak dapat bertahan seperti kandang baterai kawat, namun hal tersebut cukup efektif untuk menekan biaya.
- b) Pengefektifan penggunaan gudang. Peternak ayam juga mengefektifkan penggunaan gudang tempat penyimpanan telur, obat, vaksin, dan pakan ayam. Gudang dibangun dengan memaksimalkan penggunaan sebagai tempat penyimpanan telur, obat, vaksin, dan juga pakan ayam. Setiap komponen tersebut mempunyai bagian-bagian tersendiri di dalam gudang sehingga tidak tercampur satu sama lain. Hal tersebut dapat menekan biaya produksi pembangunan gudang.
- c) Memproduksi pakan ayam sendiri. Sebagian besar peternak ayam di Desa Kedawung tidak hanya berprofesi sebagai peternak saja, tetapi juga

berkebun. Untuk menekan biaya, peternak juga menanam pakan ayam seperti jagung di kebunnya. Sehingga kebutuhan jagung untuk pakan ayam juga dapat dipenuhi sendiri apabila jagung yang ditanam sudah panen.

d) Melakukan peminjaman modal kepada pihak lain.

b. Sumber Daya Manusia

1) Uraian Kendala

Keberhasilan suatu usaha dipengaruhi oleh pelaku usaha tersebut. Masyarakat desa merupakan sumber daya manusia dalam usaha peternakan ayam di Desa Kedawung tersebut. Masyarakat desa yang berkualitas akan berpengaruh pada keberhasilan usaha peternakan. Kondisi masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan informasi yang kurang terdapat bagaimana cara beternak ayam yang baik dan benar merupakan salah satu kendala yang sangat berarti karena merupakan pelaku utama dalam pengembangan usaha peternakan.

Disisi lain tidak adanya pembinaan dari pemerintah desa juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat desa akan cara beternak ayam dengan baik dan benar. Kurangnya sosialisasi bagaimana cara beternak ayam yang baik dan benar. Tidak adanya penyuluhan tentang pencegahan penyakit yang rentan diderita oleh ayam ras petelur. Hal tersebut sangat merugikan peternak ayam. Peternak hanya mengetahui informasi dari mulut ke mulut peternak satu dengan lainnya, jadi informasi yang didapatkan sangat minim akan pengetahuan yang akurat.

2) Cara Mengatasi Kendala

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh peternak untuk mengatasi keterbatasan ilmu pengetahuan dan informasi:

a) Membentuk kelompok peternak yang diberi nama “Unggas Jaya”.

Kelompok tersebut mengadakan pertemuan selama satu bulan sekali untuk membahas segala sesuatu mengenai peternakan yang mereka jalankan. Agenda yang dilakukan oleh kelompok peternak “Unggas Jaya” adalah tukar menukar informasi mengenai permasalahan yang dialami. Contohnya soal penyakit yang diderita oleh ayam dan cara mengatasinya. Tidak jarang juga dari pihak perusahaan swasta menawarkan untuk mengadakan sosialisasi mengenai obat atau vaksin atau vitamin atau pakan ternak yang terbaru. Selain sosialisasi pihak perusahaan swasta tersebut juga memfasilitasi peternak ayam untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dialami. Di dalam kegiatan UD. Gemilang juga terdapat sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan obat-obatan maupun vaksin, perbankan, dan juga dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sehingga peternak dapat memperoleh pengetahuan dan *skill* dalam beternak ayam.

b) Tukar menukar informasi kepada peternak lain dan/atau yang lebih senior.

Informasi dari mulut ke mulut dan tidak secara resmi sering terjadi diantara para peternak ayam. Hal tersebut sangat membantu peternak untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Tukar menukar informasi bisa berupa bagaimana cara mencegah dan mengatasi suatu penyakit dsb.

c. Lahan

1) Uraian Kendala

Lahan menjadi salah satu faktor utama dalam usaha peternakan ayam ras petelur. Lahan digunakan sebagai tempat kandang ayam, gudang penyimpanan telur, obat, vaksin, pakan ayam dan masih banyak lagi. Lahan yang sempit sangat membatasi peternak untuk berkembang. Lahan yang dibutuhkan untuk beternak ayam cukup luas. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2004, standar ukuran kandang dengan jumlah populasi ayam petelur adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah populasi 100-500 ekor, luas kandang 50 m²
- b) Jumlah populasi 500-1000 ekor, luas kandang 100 m²
- c) Jumlah populasi 1000-1500 ekor, luas kandnag 150 m²
- d) Jumlah populasi 1500-2000 ekor, luas kandnag 200 m²
- e) Jumlah populasi 2000-2500 ekor, luas kandnag 250 m²
- f) Jumlah populasi 2500-3000 ekor, luas kandang 300 m²

Melihat ketentuan standar ukuran kandang diatas, sudah sangat jelas apabila peternak akan mengembangkan usahanya diperlukan lahan yang cukup luas. Persoalan lahan berkaitan dengan modal. Apabila peternak ayam mempunyai lahan sendiri yang cukup luas, tidak perlu menambah biaya untuk membeli lahan. Tetapi jika peternak tidak mempunyai cukup lahan yang luas untuk beternak ayam, maka peternak harus menambah biaya untuk membeli lahan yang akan digunakan.

2) Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi permasalahan mengenai lahan yang sempit, peternak ayam di Desa Kedawung mensiasatinya sebagai berikut:

- a) Menggunakan kandang baterai. Kandang baterai sangat efektif digunakan untuk peternak yang mempunyai lahan sempit.
- b) Pemanfaatan satu gudang untuk berbagai jenis penyimpanan. Di dalam satu gudang dapat menyimpan berbagai macam seperti pakan ayam, telur ayam, vaksin, vitamin, dan obat. Gudang tersebut mempunyai bagian-bagian tersendiri untuk setiap jenisnya supaya tidak tercampur.

d. Perencanaan Usaha

1) Uraian Kendala

Perencanaan usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memulai sebuah usaha. Di dalam usaha diperlukan perencanaan yang matang, proses yang baik, dan tujuan yang jelas. Untuk itu pengusaha pemula perlu membuat perencanaan usaha agar usaha yang dijalankan tetap fokus dalam tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara peternak Desa Kedawung hanya menjalankan usaha mereka begitu saja tanpa melakukan perencanaan apapun untuk usaha mereka kedepannya. Usaha yang mereka jalankan kebanyakan hanya meniru orang lain yang telah berhasil terlebih dahulu. Hal tersebut dialami oleh peternak ayam kelas kecil menengah. Sebagian besar peternak yang menjalankan usahanya kurang mempunyai motivasi untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

Dari hasil observasi yang saya lakukan, tidak adanya pembinaan dari pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran peternak untuk membuat perencanaan usaha. Peternak ayam khususnya peternak ayam kelas kecil menengah tidak mengetahui betapa pentingnya membuat perencanaan usaha bagi usaha mereka. Sehingga peternak ayam kelas kecil menengah tidak dapat mencegah hal buruk yang akan terjadi dan kurangnya perencanaan pengembangan usaha. Berikut antara lain hal-hal yang dialami oleh peternak ayam Desa Kedawung tanpa membuat perencanaan usaha:

- a) Manajemen usaha yang buruk. Peternak tidak dapat memajemen usaha mereka dengan baik, salah satu yang mencolok adalah manajemen keuangan. Peternak tidak mencatat seberapa besar pengeluaran dan pemasukan yang mereka dapatkan, sehingga hal tersebut dapat menghambat perkembangan usaha mereka.
- b) Tidak adanya manajemen resiko. Peternak tidak merencanakan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Contohnya pada saat harga telur anjlok dan pakan terus naik, peternak kurang merencanakan apa yang akan mereka lakukan jika itu terjadi, sehingga peternak mendapatkan kerugian yang besar.
- c) Tidak adanya prioritas dalam melakukan usaha. Peternak tidak mempunyai perencanaan tentang apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Sehingga pengembangan usaha juga menjadi sulit dilakukan.

2) Cara Mengatasi Kendala

Membuat perencanaan yang menggambarkan bagaimana usaha tersebut kedepannya. Tidak hanya itu saja, perencanaan juga berguna sebagai pencegahan kendala-kendala yang akan terjadi sehingga sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya, sehingga kerugian yang besar sampai harus gulung tikar dapat dihindari.

e. Tidak Stabilitasnya Harga Telur

1) Uraian Kendala

Salah satu lagi kendala yang dialami oleh peternak yaitu tidak stabilnya harga telur. Hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap produksi yang dilakukan oleh peternak. Harga telur ditentukan oleh pasar, jadi harga telur setiap harinya bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan pasar pada hari itu.

Tidak stabilnya harga pasar tersebut sangat mempengaruhi terhadap keuntungan yang didapatkan oleh peternak. Keberlangsungan peternak sangat bergantung pada harga telur di pasaran tersebut. Apabila harga per kilogram telur tidak dapat memenuhi biaya produksi maka peternak mengalami kerugian. Peternak tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi seperti pakan ayam yang harganya semakin naik dari tahun ke tahun.

2) Cara Mengatasi Kendala

Pihak yang bisa menjaga kestabilan harga telur dan pakan ayam di pasaran yaitu pemerintah. Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan dan kontrol lebih terhadap apa yang terjadi di pasaran, sehingga tidak ada permainan harga pakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan harga telur ayam

bisa stabil dan peternak rakyat tidak mengalami kerugian dan dapat terus berkembang dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang sudah dilakukan dan berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan di awal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, meliputi:

- a. Kerja sama antara pemerintah desa dengan peternak

Pemerintah desa sebagai pemerintah melakukan pelayanan yang maksimal terhadap upaya yang dilakukan untuk pengembangan peternakan di Desa Kedawung. Pemerintah desa dan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak di Desa Kedawung tidak ada kerja sama khusus yang dilakukan. Pemerintah desa hanya memfasilitasi berupa tempat apabila diperlukan dalam proses sosialisasi dari pihak lain. Model kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan peternak ayam merupakan model kerja sama semu. Dalam kerja sama semu semua pihak merasa penting untuk melakukan kerja sama, akan tetapi belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaat yang dihasilkan.

b. Kerja sama antara pemerintah desa dan pihak swasta

Pola hubungan kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan UD. Gemilang yaitu pemerintah bertindak sebagai pengawas terhadap kerja sama yang dilakukan antara pihak swasta yaitu UD. Gemilang dengan masyarakat agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. Model kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan peternak ayam merupakan model kerja sama semiproduktif. Kerja sama pola ini pihak swasta tidak tahu program pemerintah dan pemerintah juga tidak mengetahui mengenai hal-hal yang dikerjakan oleh pihak swasta. Kerja sama ini lebih mengedepankan kepentingan masing-masing.

c. Kerja sama antara peternak dan pihak swasta

Kerja sama yang dilakukan antara peternak dan pihak swasta adalah saling bertukar barang yang dibutuhkan. Peternak menyetorkan hasil produksi telurnya kepada pihak UD. Gemilang dan UD. Gemilang mendistribusikan pakan ternak yang dibutuhkan oleh peternak. Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh peternak dan pihak swasta yaitu subkontrak dan hubungan kerja sama mutualistik. Hubungan kerja sama subkontrak dikarenakan peternak memproduksi telur yang akan didistribusikan ke pasaran oleh UD. Gemilang. Hubungan kerja sama mutualistik, dikarenakan kerja sama yang dilakukan saling menguntungkan kedua belah pihak dibuktikan dengan jumlah peternak menjadi semakin meningkat dan mitra kerja UD. Gemilang juga semakin meningkat.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses kerja sama *stakeholder* desa dalam pengembangan potensi lokal berbasis peternakan ayam ras petelur di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yaitu modal, lahan, sumber daya manusia, perencanaan usaha, dan tidak stabilnya harga telur.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan fenomena di lapangan, maka peneliti mencoba memberikan masukan sebagai saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kerja sama yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Seharusnya Pemerintah Desa lebih nyata dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam hubungan kerja sama yang dilakukan antara masyarakat dan pihak swasta. Sehingga masyarakat dalam menjalankan usahanya merasa terlindungi.
2. Seharusnya pemerintah desa dan peternak ayam di Desa Kedawung melakukan kerja sama untuk mengembangkan usaha peternakan.
3. Seharusnya pemerintah desa dan pihak swasta melakukan kerja sama sehingga dapat mendukung program kerja satu dengan yang lainnya, sehingga peternakan di Desa Kedawung dapat berkembang dengan baik.
4. Seharusnya ada dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh peternak ayam dan UD. Gemilang dalam menjalankan kerja sama. Sehingga dapat dengan pasti mengetahui apa saja hak dan kewajiban masing-masing sebagai *partner*

bisnis dan kemungkinan penyalahgunaan hak maupun kewajiban bisa diminimalisir.

5. Seharusnya peternak ayam lebih memperhatikan bagaimana cara mengembangkan usahanya sehingga usaha ternaknya bisa berkembang dengan baik dan dapat terus dipantau perkembangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bowo dan Andy. 2007. *Pengertian Kerjasama*. Online. <http://lompoulu.blogspot.com/2013/06/pengertian-kerjasama.html> diakses tanggal 5 Mei 2018.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2004. *Upaya Pengembangan usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Infokop 25, hal. 40-44.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- _____. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Khoirunnisaa'. 2016. *Kerja Sama Antar Aktor Pada Destinasi Pariwisata Gunung Banyak sebagai Pengembangan Potensi Wosata di Kota Batu*. Malang: Skripsi.
- Mantra, Ida Bagus. 2008. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngusmanto, H. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Sukma Fajar A.P. 2018. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengrajin Kemoceng Bulu Ayam dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Malang: SKRIPSI.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar Teori Administrasi Publik ed.1*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan.
- _____. 2010. *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang kerjasama dengan CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print. Malang.
- Soemarno. 2004. *Pengembangan ekonomi wilayah Jawa Timur: Sinergi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Alam, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia*. Malang: Pusat Penerbitan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Sutawi. 2004. *Manajemen Agribisnis*. Surabaya: Papyrus.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wakka, Abd Kadir. 2014. *Analisis Stakeholder Peengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, Vol 3 No 1:47:55.

Wibisono, yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fasho Publishing.

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widyatmoko. 2017. *Upaya Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Local Economic Resource Development (LERD) di Kabupaten Blitar*. Malang: SKRIPSI.



LAMPIRAN





Wawancara dengan Sekretaris Desa Kedawung



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kedawung



Gudang UD. Gemilang



Proses Penimbangan Pakan



Proses Pencampuran Pakan Ayam



Wawancara dengan sekretaris UD. Gemilang



Bentuk Kandang Baterai



Gudang



Kuthuk



Bersama Bapak Kepala Desa Kedawung



Proses Pengangkutan Telur



Kandang Ternak



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9931/UN10.F03.A11.11/PN/2018

Lampiran : Proposal

Hal : Surat Permohonan Riset

Kepada : Yth. Kepala Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan kegiatan Riset bagi mahasiswa :

Nama : Riska Andistyani
NIM : 145030100111031
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Kerjasama Stakeholder Desa dalam Mengembangkan Potensi Lokal Berbasis Peternakan Ayam Ras Petelur
Lamanya : 2 bulan (23 April 2018– 23 Juni 2018)

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 April 2018

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
NIP.19670217 199103 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN NGLEGOK
KANTOR DESA KEDAWUNG
Jln. Mastrip No 1 Kode Pos 66181

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No: 470 / 340 / 409.19.5 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI JATMIKO, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Kedawung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **RISKA ANDISTYANI**
NIM : 1450301001111031
Fakultas : Ilmu Administrasi
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya (UB) Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, terhitung mulai tanggal 23 April 2018 sampai dengan 28 Mei 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **KERJA SAMA STAKEHOLDER DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERBASIS PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kedawung, 28 – 05 – 2018
Kepala Desa



CURRICULUM VITAE**A. Identitas Diri**

Nama : Riska Andistyani

Alamat e-mail : riskatyani2506@gmail.com

Tempat, tanggal lahir : Blitar, 25 Juni 1996

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Dusun Sidodadi RT 01 RW 10 Desa Kedawung
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

**B. Pendidikan Formal**

1. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (2014-2018)
2. SMAN 3 Blitar (2011-2014)
3. SMPN 3 Blitar (2008-2011)
4. SDN Kedawung 3 (2002-2008)

C. Pengalaman Kepanitiaan

1. Divisi Acara Kegiatan Lomba Prestasi Kepramukaan (LOSIPRAM XVI) 2015
2. Divisi Acara Kegiatan DIKSARPRAM XXXIV 2015
3. Divisi Acara Kegiatan Lomba Prestasi Siaga Terampil (Losipil) 2015
4. Divisi Acara Kegiatan Lomba Prestasi Pramuka Penggalan (Losipraga) 2015
5. Divisi Acara DIKSARPRAM XXXV 2016
6. Divisi Acara HUT UKM Pramuka 2016
7. Divisi Acara DIKSARPRAM XXXVI 2017
8. Divisi Acara Latihan Kepemimpinan UKM Pramuka 2018

D. Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	UKM Pramuka Universitas Brawijaya	Anggota Divisi Kewirausahaan dan Rumah Tangga	2015

2.	UKM Pramuka Universitas Brawijaya	Ketua Divisi Kewirausahaan dan Rumah Tangga	2016
3.	UKM Pramuka Universitas Brawijaya	Sekretaris Dewan Racana Brawijaya	2017

E. Pengalaman Magang

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (17 Juli-15 September 2017)

F. Kemampuan

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Microsoft Office

Demikian Curriculum Vitae yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 25 Juni 2018

Riska Andistyani